

# D' Risole

“ Data Riau Sosial Ekonomi “

## dalam Sebungkus Koran 2019

Kumpulan Tulisan Karyawan BPS Se-Provinsi Riau



# D' Risole

“ Data Riau Sosial Ekonomi “

## dalam Sebungkus Koran 2019

Kumpulan Tulisan Karyawan BPS Se-Provinsi Riau



# **D’Risole “Data Riau Sosial Ekonomi” Dalam Sebungkus Koran 2019**

**ISBN: -**

**No. Publikasi: 14000.2123**

**Katalog: 1205033.14**

**Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm**

**Jumlah Halaman: vi + 61 halaman**

**Naskah:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Riau**

**Penyunting:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Riau**

**Gambar Kulit:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Riau**

**Diterbitkan oleh:**

**© BPS Provinsi Riau**

**Dicetak oleh:**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas dirilisnya publikasi **D’Risole dalam Sebungkus Koran 2019**. Publikasi ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan para statistisi dan pegawai struktural BPS se-Provinsi Riau yang dimuat diberbagai media lokal maupun media nasional. Tulisan-tulisan ini memuat berbagai hasil analisis lebih lanjut data BPS Provinsi Riau dan dituangkan dalam bentuk berita opini. Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat merangkum tulisan dari pegawai BPS se-Provinsi Riau dan dapat menjadi motivasi bagi penulis-penulis lainnya untuk dapat menuangkan ide dan fikirannya kedalam sebuah tulisan.

Publikasi **D’Risole dalam Sebungkus Koran 2019** merupakan publikasi yang diterbitkan secara periodik setiap tahun, sehingga tulisan dari para penulis di BPS se Provinsi Riau dapat terkompilasi dan terdokumentasi dengan baik dalam sebuah publikasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah bersedia menyumbangkan tulisannya kedalam publikasi ini dan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Pekanbaru, Juni 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Riau



Misfaruddin



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI .....	V
MENGENAL LEBIH DEKAT POTENSI DESA DI RIAU, OLEH : IMELDA LESTARI SIBORO , SST DIMUAT DI PEKANBARU.TRIBUNNEWS.COM, 7 JANUARI 2019 .....	1
UNTUNG RUGI BELANJA ONLINE, OLEH : RAHMI RENZYA, SST DIMUAT DI PEKANBARU.TRIBUNNEWS.COM, 8 JANUARI 2019 .....	3
CABAI MERAH SELALU MEMBUAT PEDAS KANTONG MASYARAKAT, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI DI KORAN RIAU POS, 10 JANUARI 2019 .....	5
MASA DEPAN UMK ERA REVOLUSI INDUSTRI, OLEH : SRI MULYANI, SST, M.STAT DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 21 JANUARI 2019 .....	8
LONJAKAN PENDUDUK USIA PRODUKTIF, BONUS ATAU BOM WAKTU??. OLEH: METALIA ALFA, SST DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 4 FEBRUARI 2019 .....	11
DANA DESA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI KORAN METRO RIAU, 8 FEBRUARI 2019 .....	14
PERAN PENDUDUK MISKIN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI KORAN HARIAN METRO, 11 FEBRUARI 2020 .....	16
KONSUMSI RUMAHTANGGA PENYELAMAT PDB, OLEH : SRI MULYANI, SST, M.STAT DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 18 FEBRUARI 2019 .....	19
USAHA MIKRO KECIL RIAU 'SEBUAH REALITA DAN FAKTA', OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI KORAN METRO RIAU, 25 FEBRUARI 2019 .....	22
SIAPKAH RIAU TANPA MINYAK BUMI DAN GAS?, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI MAJALAH VARIA STATISTIK 1 MARET 2019 .....	24
MEWASPADAI PENUAAN PENDUDUK (AGING POPULATION) INDONESIA, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI KORAN HARIAN METRO RIAU, 25 APRIL 2019 .....	27

JALAN TERJAL WANITA INDONESIA MENUJU KESETARAAN GENDER, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI BERTUAHPOS.COM, 4 MEI 2019 _____	30
MODAL SOSIAL DALAM PERGULATAN PESTA DEMOKRASI, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI BERTUAHPOS.COM, 16 JUNI 2019 _____	32
BIJAK DENGAN KELAPA SAWIT, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM , 19 JULI 2019 _____	35
HARGA CABAI MERAH YANG SEMAKIN PEDAS, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 5 AGUSTUS 2019. _____	38
KISAH NENEK SAHNUN DAN MEMUDARNYA MODAL SOSIAL KITA, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 23 AGUSTUS 2019 _____	41
MIGRASI RIAU, PELUANG ATAU MASALAH?, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 6 SEPTEMBER 2019 _____	44
ASAP RIAU DUKA MASYARAKAT SERANTAU, OLEH :MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 9 SEPTEMBER 2019 _____	47
ROKAN HILIR MAJU DENGAN STATISTIK, OLEH : ARFINA AMALIA, SST DIMUAT DI KORAN POSMETRO ROKAN HILIR, 30 SEPTEMBER 2019 _____	49
SUMPAH DI BAWAH ASAP, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 1 OKTOBER 2019 _____	51
MENGENAL KEKUATAN EKONOMI ROKAN HILIR, OLEH : ARFINA AMALIA, SST DIMUAT DI KORAN POSMETRO ROKAN HILIR, 16 OKTOBER 2019 _____	53
UMK DAN INDONESIA MAJU OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 24 OKTOBER 2019 _____	56
SEJAHTERAKAH NELAYAN KITA ?, OLEH : MUJIONO, SE DIMUAT DI GORIAU.COM, 12 DESEMBER 2019 _____	59

## Mengenal Lebih Dekat Potensi Desa di Riau

Oleh : Imelda Lestari, SST

*Badan Pusat Statistik atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPS adalah lembaga yang dipercaya untuk memberikan data bagi pemerintah dan masyarakat. BPS secara khusus telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai satu satunya rujukan statistik di Indonesia dalam rangka kebijakan satu data yang diwacanakan oleh beliau. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPS yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat adalah pendataan potensi desa (Podes), hal ini mungkin disebabkan karena yang menjadi responden bukan masyarakat langsung (keluarga/rumah tangga) tetapi adalah aparat desa/kelurahan dan kecamatan.*



DIMUAT DI PEKANBARU.TRIBUNNEWS.COM, 7 JANUARI 2019



Kegiatan Pendataan Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam periode waktu 10 tahun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Dari sejarahnya, Pendataan Podes pertama kali dilakukan pada tahun 1980 bersamaan dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 1980. Tujuan pendataan ini adalah untuk mendapatkan data mengenai keberadaan, ketersediaan, dan perkembangan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi pemerintahan khususnya desa. Adapun data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai sarana dan prasarana, potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Dengan tersedianya informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan wilayah baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selama periode tahun 2010-2020, Pendataan podes telah dilaksanakan pada tahun 2011, 2014 dan terakhir pada tahun 2018 yang baru saja kita lalui. Pada tahun 2011

pendataan ini dilakukan untuk mendukung persiapan sensus pertanian 2013, sedangkan pendataan podes pada tahun 2014 dilakukan untuk persiapan sensus ekonomi 2016. Begitu juga dengan pendataan podes 2018 untuk persiapan sensus penduduk tahun 2020.

Berdasarkan hasil pendataan podes tahun 2018, Riau memiliki wilayah administrasi sebanyak 12 kabupaten/kota, 169 kecamatan, dan 1.875 desa/kelurahan atau jika dibedakan antara desa dan kelurahan menjadi 1.607 desa dan 268 kelurahan. Jika dilihat dari topografi wilayah, hampir semua desa yang ada di Riau merupakan dataran (98,3%). Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Riau, hanya Kota Pekanbaru yang sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakatnya berada di sektor perdagangan dan jasa, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya masih bertumpu pada sektor pertanian, atau jika mau dilihat secara persentase dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Riau, ada sebanyak 89,9 persen desa/kelurahan yang penghasilan



utama sebagian besar masyarakatnya di sektor pertanian. Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan sebagai kabupaten yang memiliki potensi kelapa sawit terbesar di Riau, selain kelapa sawit Rokan Hilir juga memiliki potensi pada subsektor perikanan tangkap. Sedangkan untuk Komoditas Karet, Kabupaten Kamparlah yang berada di urutan teratas, dan untuk komoditas kelapa kita bisa mengandalkan kabupaten Indragiri Hilir.

Dari hasil pendataan podest 2018 juga diketahui bahwa dari seluruh kabupaten/kota di Riau ternyata masih banyak ditemukan desa yang rumah penduduknya masih belum dialiri listrik. Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang penduduknya belum/ tidak menggunakan listrik yaitu sebanyak 193 desa dari total 236 desa yang ada di Indragiri Hilir atau ada sekitar 81 persen, bahkan di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi juga masih ada ditemukan di 11 kelurahan, keluarga yang bukan pengguna listrik.

Di tahun 2018, ternyata gas kota sudah mulai digunakan sebagai bahan bakar memasak, tercatat ada 3 kelurahan di Kota Pekanbaru yang masyarakatnya menggunakan gas kota sebagai bahan bakar memasak, sedangkan penggunaan LPG 3 kg jelas masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat di desa/kelurahan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Untuk sumber air minum sebagian besar masyarakat desa/kelurahan di Riau memilih air isi ulang, kecuali Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum.

Dari 1.875 desa/kelurahan yang ada di Riau ternyata ada 77 persen desa yang sebagian besar masyarakatnya membuang sampah dengan membuat lubang/dibakar dan sebanyak 11,36 persen desa yang sebagian besar masyarakatnya masih membuang sampah di sungai/saluran irigasi/danau/

laut. Padahal kebiasaan membuang sampah di sungai bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir apalagi di saat musim penghujan, tercatat dalam 3 tahun terakhir ini sebanyak 584 desa/kelurahan di seluruh kabupaten/kota pernah mengalami banjir. Dalam hal ini Kabupaten Kampar, Kuansing, dan Inhu menyumbang angka yang sangat besar, sebanyak 134, 100, dan 99 desa untuk masing-masing kabupaten. Sedangkan dalam hal kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 468 desa/kelurahan pernah mengalami dalam 3 tahun terakhir. Indragiri Hilir tercatat sebagai daerah yang terkena dampak kebakaran hutan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 95 desa.

Itulah sekilas mengenai potensi desa di Riau. Sebagai penutup, penulis juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS memang membutuhkan anggaran yang besar, tetapi akan jauh lebih mahal jika kita membangun/ membuat rencana pembangunan tanpa data.

## Untung Rugi Belanja Online

Oleh : Rahmi Renzya, SST

*Belanja online yang saat ini banyak dipilih masyarakat tidak lain karena banyaknya kemudahan yang dirasakan dibandingkan dengan belanja konvensional. Selain itu, meluasnya penggunaan internet di semua kalangan, menjadikan belanja online sebagai tren yang sangat menjamur. Dari sisi ekonomi, tren belanja online berpengaruh positif terhadap beberapa lapangan usaha. Namun juga perlu diperhatikan bahwa kejahatan dan penipuan masih sangat mungkin terjadi ketika memutuskan untuk melakukan belanja online. Masyarakat juga perlu berhati-hati dan cerdas memanfaatkan teknologi yang ada.*



DIMUAT DI PEKANBARU.TRIBUNNEWS.COM, 7 JANUARI 2019

**B**elanja online kini sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Tak perlu jauh-jauh pergi ke toko atau pusat perbelanjaan. Belanja online dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Cukup duduk manis di depan komputer atau sambil memegang smartphone yang terkoneksi internet, anda sudah bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Mulai dari pakaian, popok bayi, handphone hingga mesin cuci bisa dipesan melalui berbagai aplikasi belanja online. Berbagai kemudahan dan kepraktisan dari belanja online menjadi magnet tersendiri bagi para konsumennya. Bahkan di Indonesia sudah ada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diperingati setiap tanggal 12 Desember. Berbagai promo menarik, seperti potongan harga atau gratis biaya pengiriman, ditawarkan pada hari tersebut. Kekinian. Mungkin itulah hal yang tepat menggambarkan fenomena belanja online saat ini.

Pesatnya kemajuan teknologi saat ini menjadi pemicu tingginya peminat

bisnis belanja online, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Dengan fasilitas internet, penjual dapat memasarkan barangnya dengan memberikan deskripsi menyeluruh mengenai barang tersebut, biasanya disertai dengan foto. Dan pembeli dapat memilih dan membandingkan berbagai macam barang dari beberapa toko yang ada, memasukkannya ke dalam keranjang belanjaan, bayar, dan beberapa hari kemudian barang tersebut sudah ada di tangan. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2017, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet di Provinsi Riau mencapai 32,16 persen. Dari data tersebut, sebanyak 10,79 persen pengguna internet memanfaatkannya untuk melakukan pembelian dan penjualan barang/jasa. Artinya, sudah lebih dari 600 ribu penduduk Riau yang melakukan transaksi perdagangan melalui online. Walaupun pemanfaatan internet sebagian besar masih digunakan untuk mengakses sosial media, tingginya jumlah pengguna internet ini bisa menjadi pangsa pasar yang menarik bagi para

pengusaha yang baru mulai merintis usahanya, baik skala kecil maupun menengah.

Tak dapat dielakkan bahwa fenomena belanja online ini cukup berpengaruh terhadap roda perekonomian suatu daerah. Sektor perdagangan lah yang sudah pasti berdampak positif. Metode belanja konvensional diakui masih dilakukan oleh sebagian besar orang. Namun minat masyarakat terhadap metode belanja online yang cukup besar juga turut mempengaruhi kinerja ekonomi suatu daerah. Selain membuka jalan pemasaran bagi para pengusaha pendatang baru, belanja online juga berdampak pada lapangan usaha yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau selama 2017 di lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh 5,43 persen. Selama kurun waktu 2013-2017, laju pertumbuhannya selalu positif. Bisa dibayangkan ke depannya lapangan usaha ini akan terus berkembang serta mendatangkan peluang.

Selain informasi dan komunikasi, belanja online juga mempengaruhi kinerja di lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, terutama pada subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir. Konsumen di Pulau Sumatera bisa memesan barang yang di jual di Pulau Jawa. Begitu pula sebaliknya. Bahkan barang-barang dari luar negeri pun sudah bisa disediakan. Pengiriman barang lintas provinsi dan lintas negara ini tentu saja membutuhkan jasa pengiriman barang. Apapun yang dijual secara online harus melewati jasa pengiriman barang. Tak dapat dipungkiri bahwa jasa pengiriman barang melesat naik di era e-commerce saat ini. Menurut data BPS, subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir selalu mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan subkategori

ini di Provinsi Riau mencapai 5,01 persen, membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,23 persen.

Setiap hal yang terbelang baru, pasti mempunyai kekurangan. Layaknya dua sisi mata uang. Berbagai sisi positif dari metode belanja online pasti diiringi dengan sisi negatifnya. Penggunaan teknologi dalam dunia bisnis ini dapat pula dimanfaatkan sebagai alat penipuan dan kejahatan lainnya. Bagi para konsumen yang belum begitu paham dengan belanja online dapat dengan mudahnya percaya dan ingin segera memiliki produk yang diinginkan dengan cepat. Kemudahan yang diberikan dengan adanya metode belanja online tentulah memiliki resiko yang tinggi pula. Belanja online tidak bisa menjamin keamanan dalam tiap transaksi karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan tersebut dengan cara yang tidak benar. Seiring dengan perkembangan belanja online di Indonesia, berkembang pula penipuan-penipuan yang mengatasnamakan online shop. Sudah banyak korban akibat online shop palsu tersebut.

Kasus penipuan belanja online terjadi karena perilaku konsumen yang kurang hati-hati. Layaknya transaksi di dunia nyata, transaksi di dunia maya pun memerlukan kehati-hatian, seperti kejelasan dengan siapa kita sedang bertransaksi. Perlu sedikit meluangkan waktu untuk mempelajari identitas dengan siapa kita bertransaksi. Untuk itu, sebagai konsumen kita juga perlu pintar dan bijak memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai bukan keuntungan yang didapat, malah rugi yang dirasakan.

## *Cabai Merah Selalu Membuat Pedas Kantong Masyarakat*

Oleh : Mujiono, SE

*Pada setiap awal bulan, BPS Provinsi Riau merilis angka inflasi di Riau (gabungan 3 kota yaitu kota pekanbaru, tembilahan dan dumai). Cabai merah selalu menjadi komoditas yang menyebabkan inflasi di Riau. Kenapa cabai merah selalu menyebabkan inflasi di Riau?*



DIMUAT DI METRO RIAU, 10 JANUARI 2019

Inflasi merupakan suatu keadaan meningkatnya harga produk/jasa disuatu wilayah pada periode tertentu yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah meningkatnya konsumsi atau permintaan masyarakat terhadap produk tersebut. Inflasi bisa juga terjadi dikarenakan produk tersebut langka sebagai akibat berkurangnya produksi atau terganggunya jalur distribusi, atau faktor-faktor lain seperti kenaikan biaya produksi sehingga berakibat semakin tingginya harga jual suatu produk, atau juga karena kondisi keamanan yang tidak stabil sebagai dampak kekacauan politik.

Inflasi yang stabil merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat miskin semakin rendah, yang berakibat pada semakin sulitnya mereka memenuhi kebutuhan dasar yang akhirnya mereka yang hidup miskin akan menjadi lebih miskin. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan serta juga menyulitkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan untuk konsumsi dan investasi yang akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Andil Cabai Merah pada Inflasi Riau

Cabai merah menciptakan pola yang luar biasa dengan menjadi penyebab utama inflasi di Provinsi Riau. Fenomena tersebut terjadi sejak tahun 2016, dimana pada bulan Juli 2016, cabai merah menjadi penyebab utama dengan andil sebesar 0,19 persen, September sebesar 0,55 persen, Oktober sebesar 0,54 persen, dan November sebesar 0,57 persen.

Pada tahun 2017, cabai merah juga menjadi faktor utama pemicu inflasi. Pada periode tersebut, cabai merah berada pada peringkat pertama penyebab inflasi di Riau. Pada Agustus – November 2017, cabai merah memiliki andil 0,22 persen, September sebesar 0,12 persen, kemudian naik menjadi 0,26 persen Oktober, dan pada November sebesar 0,12 persen.

Pada Maret 2018, cabai merah mengalami kenaikan harga dengan menduduki peringkat pertama dalam top ten komoditas penyumbang inflasi Riau dengan sumbangan sebesar 0,28 persen. Sama dengan

kondisi 2016-2017, bulan Agustus – Oktober tahun 2018 cabai merah juga menduduki peringkat pertama penyebab inflasi Riau. Pada bulan Agustus cabai merah menyumbang inflasi sebesar 0,23 persen, September 0,07 persen, kemudian pada Oktober sebesar 0,41 persen.

Cabai merah selalu menjadi perbincangan hangat dimasyarakat serta menjadi topik utama di media cetak dan elektronik di Riau. Kenapa harga cabai merah tidak stabil dan cenderung naik tinggi serta selalu menyumbang inflasi?. Kata kunci terjadinya kenaikan harga pada komoditas tersebut terletak pada ketersediaannya cabe merah belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat Riau.

Pertama, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap cabai merah sangat tinggi. Tersedianya komoditas ini dirumah tangga menjadi keniscayaan. Realita menunjukkan, ketersediaan cabai merah dipasaran terkadang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, bahkan kelangkaan terjadi sehingga berakibat harga komoditas ini melambung.

Kedua, produksi cabai merah di Riau belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Riau. Ketersediaan produksi yang cukup menjadi suatu keharusan disuatu wilayah mengingat komoditas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Data BPS berdasarkan luas tanam dan luas panen yang dilaporkan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi cabai merah besar tahun 2017 sebesar 15.813,4 ton. Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga di Riau sebanyak 1.598.305 rumah tangga. Produksi pada tahun 2017 ini hanya mampu memenuhi sekitar 9,8 kg per tahun per rumah tangga, atau hanya sebesar 0,8 kg per bulan per rumah tangga dan belum termasuk kebutuhan cabai merah oleh hotel, restoran dan rumah makan serta penyedia jasa akomodasi lainnya yang ada di Riau.

Ketiga, jalur distribusi antar wilayah masih belum stabil. Permasalahan cuaca sangat berpengaruh pada lancarnya jalur distribusi dari daerah penghasil menuju wilayah Riau. Jalan yang rusak, banjir dan longsornya jalan sangat menentukan lancarnya pasokan cabai merah dan bawang merah dipasaran.

Akhirnya,

Pemerintah akan mudah mengatasi masalah cabai merah dengan syarat bahwa pemerintah daerah di Riau bersama bersinergi dalam upaya memenuhi kebutuhan akan cabai merah, sehingga mudah didapatkan masyarakat serta tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan inflasi di Riau.

Mengingat bahwa produksi kita belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri sebagai akibat dari konsumsi masyarakat yang tinggi, gagal panen dan lain-lain, maka sudah seharusnya pemerintah Provinsi Riau melalui dinas-dinas terkait mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menjaga agar stok cabai merah cukup dan mudah didapatkan masyarakat dengan harga yang murah.

Peningkatan produksi cabai merah dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan negara yang sangat luas tersebar di wilayah Riau. Upaya penyediaan bibit unggul, bantuan pupuk serta bimbingan melalui Dinas terkait kepada masyarakat sangat diperlukan agar produksi cabai merah meningkat. Upaya menumbuhkan budaya masyarakat menanam cabai merah dan tanaman lain pada halaman rumah perlu digalakkan kembali. Semakin banyak masyarakat yang menanam setidaknya mengurangi kebutuhan masyarakat dipasaran, sehingga permintaan akan cabai merah menurun.

Jalan yang menghubungkan antara wilayah Riau dengan Provinsi tetangga seperti jalan dari Sumatera Barat dan jalan dari



Sumatera Utara serta akses jalan lain harus tetap dijaga agar tetap lancar dan bebas hambatan. Sebagai dampak datangnya musim penghujan, perbaikan jalan yang rusak baik disebabkan oleh banjir dan longsor serta faktor-faktor lain harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah Riau melalui dinas-dinas terkait agar jalur distribusi tetap lancar.

Pemerintah daerah se-Provinsi Riau harus bersinergi bersama menjaga agar cabai merah tetap tersedia dan murah serta mudah didapat masyarakat. Perlu komitmen bersama baik pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga Riau tetap aman dan stabil apalagi di tahun politik ini. Pemerintah harus menjamin bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan damai sehingga tidak membuat kekacauan dimasyarakat sehingga harga-harga tidak melambung tinggi.

Semoga..

<https://riau.bps.go.id>



## *Masa Depan UMK Era Revolusi Industri*

Oleh : Sri Mulyani, SST, M.Stat

*Kehadiran Revolusi Industri 4.0 diyakini banyak mengubah perilaku konsumen dan model bisnis termasuk UMK (Usaha Mikro Kecil). Perubahan gaya hidup konsumen menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin dekat dan nyaman. Hal ini menuntut UMK bersaing tak kalah cepat menemukan demand, jika tidak ingin dilupakan.*



**DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 21 JANUARI 2019**



Sebagai usaha yang banyak digeluti di Indonesia, UMK turut mendukung perekonomian nasional. UMK merupakan kekuatan Produk Domestik Bruto (PDB), terlebih karena menyerap tenaga kerja lebih 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan (SE2016-Lanjutan), keberadaan UMK mencapai 98,68 persen dari 26 juta usaha di tanah air.

UMK dikatakan buffer zone karena mampu bertahan dibawah terpaan krisis ekonomi. Hal ini disebabkan penggunaan bahan baku lokal yang tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah. Kebanyakan UMK berdiri dengan modal sendiri sehingga efek kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan.

Menariknya, produk yang dihasilkan UMK ternyata dekat dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Beberapa usaha UMK yang banyak dijual saat ini seperti kuliner, fashion, dan produk kreatif.

Hal ini didukung dari hasil SE2016-Lanjutan, dimana 46,40 persen UMK didominasi oleh usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, 16,99 persen oleh usaha sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta 16,68 persen oleh usaha sektor industri pengolahan.

Dulu, usaha UMK kurang diminati karena hanya meraup omset terbilang kecil. Namun di dalam era Revolusi Industri 4.0, ungkapan itu bisa saja berubah. Revolusi Industri 4.0 bisa membawa siapa saja menjadi sukses atau bahkan yang dulunya sukses bisa jatuh tak bersisa.

### Perubahan Model Bisnis

Dalam teori ekonomi klasik bagi orang awam pahami, ekonomi akan dikuasai oleh para pemilik modal. Tapi kini, dalam era Revolusi Industri 4.0, perusahaan dengan brand besar sekalipun dapat terpaksa menyerah. Beberapa perusahaan ritel kenamaan baru-baru ini harus menutup gerai diantaranya: 7-eleven,-

Lotus dan Debenhams.

Tidak dipungkiri, Revolusi Industri 4.0 membangunkan tidur panjang model bisnis lama yang tidak menyesuaikan zaman. Perubahan model bisnis saat ini begitu cepat, menggeser mereka yang lambat dan berjalan di tempat. Betapa tidak, penguasaan teknologi semakin tinggi, akses informasi semakin masif, kebutuhan produk/jasa semakin beragam, perubahan sosial-ekonomi masyarakat tak terelakkan. Sebut saja istilah *leisure*, pola konsumsi masyarakat kekinian. Masyarakat cenderung menggunakan pendapatan untuk belanja liburan dan jalan-jalan dibandingkan belanja barang.

“Platform hidup sudah berubah!” Gawai irama model bisnis tak bisa sama seperti dulu. Mau tak mau memaksa pelaku usaha berlomba-lomba memenuhi kebutuhan manusia sesuai apa yang mereka inginkan saat ini. Namun seperti apa?

Menurut penelitian Nielsen Quest for Convenience, konsumen saat ini begitu menghendaki pemenuhan kebutuhan yang nyaman. Berdasarkan analisisnya, ada enam faktor yang mendorong perubahan perilaku konsumen, yaitu: urbanisasi; jumlah anggota rumah tangga yang menyusut; transportasi perkotaan yang padat; peran gender yang berkembang; kebutuhan sesuai dengan generasi; dan meningkatnya serapan atau adaptasi terhadap teknologi. Dari faktor ini dapat dijadikan rujukan model bisnis apa yang dapat menangkap keinginan konsumen.

Berbicara adaptasi teknologi, rupanya kehadiran internet menjadi akselerasi bertemunya berbagai pelaku bisnis dengan konsumen. Lihat saja, saat ini muncul model bisnis e-commerce yang tumbuh subur dengan perkiraan perolehan omset fantastis. Jika dilihat perkembangan e-commerce, banyak bermunculan pelaku UMK baru yang menggelar lapaknya, sebut saja, via web seperti Lazada, Tokopedia dsb, atau via media sosial seperti Facebook, Instagram dsb.

Peluang ke Depan

Terkait fenomena banyaknya muncul pelaku UMK baru atau *new entrepreneur* di tanah air, perlu dicermati apakah pola ini akan berjalan stagnan atau justru berkembang semakin pesat. Jika kita amati lingkungan sekitar tempat kita tinggal, mungkin kita akan terkejut ketika mengetahui salah satu pelaku UMK yang menggeluti bisnis e-commerce adalah tetangga kita sendiri. Kini, berbekal *smartphone* dan internet saja, pelaku UMK dapat go internasional meski berlapak di rumah tanpa perlu bersusah payah membuka gerai.

Penggunaan internet sendiri telah menjadi kebutuhan dewasa ini. Tahun 2018 saja, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), persentase penduduk Indonesia berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet mencapai 39,90 persen. Dapat dikatakan, 4 dari 10 penduduk kita sudah melek internet. Besarnya pengguna internet dapat menjadi magnet bagi pelaku UMK untuk masuk dalam pasar digital.

Peluang UMK dalam pasar digital ternyata didukung pula dengan ketersediaan akses internet yang semakin luas. Baru-baru ini BPS merilis data Potensi Desa (PODES) 2018. Salah satu indikator yang dihasilkan yaitu ketersediaan akses internet yang telah mampu meng-cover hingga 90,98 persen desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya harapan bagi perkembangan UMK untuk tumbuh subur tidak lagi terpusat di perkotaan namun dapat mengepakkan sayapnya hingga ke wilayah pedesaan.

Sementara dari sisi demand, peluang tumbuhnya UMK didorong oleh besarnya pangsa pasar yang ada di tanah air. Dari publikasi Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Pengeluaran, pada tahun 2017 diketahui 56 persen PDB dibentuk dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Besarnya angka ini menandakan ketersediaan



demand yang besar di depan mata. Tengok saja, pengeluaran konsumsi rumahtangga bahkan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan andil 2,69 persen dari 5,17 persen pertumbuhan PDB di kuartal III tahun 2018 lalu. Meskipun kondisi global saat ini tidak menentu, konsumsi rumahtangga masih cukup kuat mendukung gerak lajunya PDB.

#### Menuju Making Indonesia 4.0

Momentum Revolusi Industri 4.0 tentu saja tidak disia-siakan pemerintah. Pemerintah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 diharapkan dapat memberi peluang merevitalisasi sektor industri manufaktur dan mempercepat pencapaian visi Indonesia menuju sepuluh ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB tahun 2030 yang diperkirakan mencapai kapita di atas US\$ 12.475.

Terkesan berlebihan, namun pastinya bukan hitungan semalam. Pemerintah berharap dengan berbagai kebijakan yang tepat nantinya akan tercipta peningkatan yang masif pada output sektor industri manufaktur dan memperkuat kembali struktur PDB nantinya.

Sejalan dengan tujuan Making Indonesia 4.0 tersebut, secara faktual, menurut data BPS tahun 2017 laju pertumbuhan sektor industri manufaktur mencapai 4,74 persen atau meningkat 0,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Prestasi yang sangat menggembirakan karena sektor manufaktur nasional mulai merasakan hadirnya semangat baru me ningkatkan produktivitas di tengah penerapan Revolusi Industri 4.0.

Disini UMK dapat mengambil peran. Kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah membuka ruang bisnis yang murah

dan efisien. Dengan karakteristik usaha pada UMK dan gelombang Revolusi Industri 4.0 yang terjadi diharapkan mampu mendongkrak output sektor manufaktur tanah air melalui tangan-tangan pelaku UMK. Dengan catatan, model bisnis yang dijalankan dapat mengikuti gaya demand masa kini dengan terus berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Meski besar harapan di pundak pelaku UMK, kita tidak dapat menampik persoalan-persoalan yang masih dihadapi UMK. Hasil SE2016-Lanjutan mencatat, kurangnya pemodal, adanya persaingan, sulitnya pemasaran dan masalah ketersediaan bahan baku menjadi hambatan utama UMK saat ini. Untuk itu, perlu komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMK sebagaimana menjadi salah satu langkah prioritas nasional yang tertuang dalam Making Indonesia 4.0. Melalui skema kebijakan yang tepat, sejatinya UMK dapat tumbuh dan berkembang semakin baik di era Revolusi Industri 4.0 ini. Semoga\*

## *Lonjakan Penduduk Usia Produktif, Bonus Atau Bom Waktu ?*

Oleh : Metalia Alfa, SST

*Bonus demografi dapat dilihat dari rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk produktif. Rasio ketergantungan terus menurun hingga tahun ini, Riau sudah mulai merasakan bonus demografi. Mulai tahun 2019, rasio ketergantungan di Riau sudah berada pada angka di bawah 50. Artinya dari 100 penduduk produktif, penduduk tidak produktifnya tidak sampai 50 orang, dimana satu orang tidak produktif ditanggung oleh 2 orang produktif atau lebih. Angka ini diproyeksikan terus menurun hingga tahun 2030 dan kembali meningkat hingga kembali di atas 50 sekitar tahun 2040an.*



**DITERBITKAN DI KORAN RIAU POS, 4 FEBRUARI 2019**

**P**enduduk usia produktif merupakan penduduk usia 15-64 tahun. Lalu, apa perlunya komposisi penduduk menurut kelompok umur ini kita perhatikan? Bayangkan saja jika penduduk tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) jumlahnya sangat banyak. Maka penduduk usia produktif memiliki tanggungan yang cukup besar. Sebaliknya, jika penduduk tidak produktif sedikit, maka tanggungan penduduk produktif pun akan sedikit. Nah, inilah isu bonus demografi yang sudah sering kita dengar.

Bonus demografi dapat dilihat dari rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk produktif. Maka, semakin kecil rasio ketergantungan, semakin kecil pula tanggungan penduduk produktif. Dengan kecilnya rasio ketergantungan ini, maka seharusnya penduduk produktif dapat berkreasi lebih dengan besarnya saving. Negara pun seharusnya mendapatkan

keuntungan lebih jika dapat memanfaatkan keadaan ini dengan baik.

Bagaimana dengan keadaan di Riau? Rasio ketergantungan ini terus menurun hingga tahun ini, Riau sudah mulai merasakan bonus demografi. Mulai tahun 2019, rasio ketergantungan di Riau sudah berada pada angka di bawah 50. Artinya dari 100 penduduk produktif, penduduk tidak produktifnya tidak sampai 50 orang, dimana satu orang tidak produktif ditanggung oleh 2 orang produktif atau lebih. Angka ini diproyeksikan terus menurun hingga tahun 2030 dan kembali meningkat hingga kembali di atas 50 sekitar tahun 2040an.

Ya, Riau sudah mulai merasakan bonus demografi hingga tahun 2040. Puncaknya sekitar tahun 2030 dengan rasio ketergantungan mencapai 44. Sebagaimana kita ketahui, bonus demografi merupakan dampak dari keberhasilan penduduk menurunkan tingkat kelahiran. Penduduk yang lahir pada saat angka kelahiran yang tinggi sebelum suksesnya program KB,

kini telah mencapai usia produktif. Setelah berakhirnya masa bonus demografi, lonjakan penduduk usia produktif ini akan menua bersama hingga terjadilah lonjakan lansia.

### **Sudahkah kita siap dengan fenomena ini?**

Lihatlah keadaan di Riau saat ini, kemiskinan di Riau tercatat masih 7,21 persen pada Bulan September 2018, yang artinya sekitar 494,26 ribu penduduk Riau masih miskin. Angka ini memang secara umum terus menurun. Namun masih terdapat perbedaan yang cukup tajam antara daerah perkotaan dan pedesaan, dimana sebagian besar penduduk miskin ini berada di pedesaan. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pun meningkat dibandingkan September tahun sebelumnya. Hal ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Yang semakin disayangkan lagi, secara umum indeks gini ratio yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk juga meningkat. Akan tetapi ini hanya terjadi di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan mengalami sedikit penurunan sehingga dapat dikatakan ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan semakin besar.

Dengan adanya bonus demografi, diharapkan penduduk produktif dapat membawa perbaikan-perbaikan di berbagai sisi kehidupan termasuk meningkatkan kesejahteraan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan dan mendongkrak perekonomian. Keadaan surplus penduduk produktif ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Kesempatan ini belum tentu dapat terulang di dekade-dekade yang akan datang. Sudah barang tentu, kuantitas yang besar tidak akan menguntungkan jika tidak dibarengi dengan kualitas yang mumpuni. Malahan bisa menjadi bumerang untuk Riau di masa yang akan datang. Untuk dapat mengoptimalkan kondisi ini agar benar-benar menjadi bonus,

tentu kita harus memiliki kesiapan dalam berbagai hal.

Beberapa hal yang harus disiapkan untuk memanfaatkan 'bonus' ini antara lain kualitas SDM (sumber daya manusia) yang baik dan lapangan kerja yang cukup. Kualitas SDM dapat kita lihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan, fasilitas pendidikan tentu harus memadai. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang harus terus ditingkatkan sekaligus sebagai upaya dalam persiapan menyambut lonjakan lansia.

Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikumpulkan BPS pada tahun 2018 yang lalu, Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Riau meningkat sebesar 4,5 poin dari 59,04 (pada tahun 2014) menjadi 63,54. Indeks Pembangunan Desa disusun berdasarkan lima dimensi, yaitu Dimensi Pelayanan Dasar, Dimensi Kondisi Infrastruktur, Dimensi Transportasi, Dimensi Pelayanan Umum, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dari kelima dimensi ini, dimensi penyelenggaraan pemerintah desa mengalami peningkatan paling tinggi (meningkat 11,06 poin). Hal ini mengindikasikan sudah ada perbaikan pada SDM perangkat desa yang merupakan bagian dari penduduk produktif tadi. Namun, pada dimensi pelayanan dasar, peningkatannya hanya 3,53 poin sehingga dapat dikatakan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan belum terlalu signifikan.

### **Penyerapan angkatan kerja harus optimal**

Hal lain yang juga tak kalah penting dalam memanfaatkan 'bonus' lonjakan penduduk produktif ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apabila peningkatan jumlah penduduk produktif tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka akan terjadi peningkatan pengangguran dan hanya akan menambah beban negara.

Sementara itu, BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) masih mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Riau pada kondisi Agustus 2018 sebesar 6,20 persen. Dengan kata lain, masih ada sekitar 192,80 ribu penduduk Riau yang menganggur. Berkebalikan dengan kemiskinan, TPT di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan bahkan sampai dua kali lebih tinggi. Penduduk produktif yang belum mendapatkan pekerjaan sebaiknya lebih bersemangat untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan TPT menurut tingkat pendidikan, lulusan SMK yang notabene dipersiapkan untuk siap memasuki dunia kerja malah yang paling tinggi mencapai 10,66 persen.

Manfaatkan sehatmu sebelum sakit, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bagi penduduk produktif, teruslah berkarya. Bangun negeri kita dengan prestasi. Jangan hanya menunggu pekerjaan. Mari ciptakan pekerjaanmu sendiri!! Apalagi sekarang sudah jamannya digital, banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Ditambah lagi pada era industri 4.0, sekarang peran manusia telah banyak digantikan oleh mesin dan internet. Untuk itu, perlu kreativitas lebih, dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pun meningkat dibanding tahun sebelumnya dan ini harus diserap dengan optimal. Tingginya pengangguran di kota dan tingginya kemiskinan di desa hendaknya menjadi pertimbangan bagi para pencari kerja untuk membangun desa.

Jika penduduk produktif tidak terus meningkatkan kualitas diri dan melakukan inovasi-novasi yang dapat memajukan Riau khususnya dan bangsa ini umumnya akan berakibat buruk bagi negeri ini. Bayangkan saja, penduduk produktif yang jumlahnya besar jika tidak dibarengi dengan kualitas, bukannya produktif, malah menjadi tanggungan beban negara. Bisa saja akan

meningkatkan jumlah pengangguran yang berpotensi menjadi 'bom waktu' yang dapat meledak kapan pun. Bagaimana tidak, banyaknya pengangguran tanpa dibarengi kualitas juga akan sulit untuk dimanfaatkan. Bentuk ledakan 'bom' ini pun bisa bermacam-macam mulai dari peningkatan tindak kriminal, kelaparan dan kemiskinan dimana-mana hingga terperosoknya perekonomian kita. Semoga penduduk produktif di Riau dapat menjadi 'bonus' bagi masa depan, bukannya 'bom' yang dapat meledak dan merugikan lingkungannya.

## *Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan*

Oleh : Mujiono, SE

*Komitmen pemerintah untuk terus membangun desa tercermin dari adanya program dana desa dan besarnya dana yang telah digelontorkan. Penggelontoran dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kenapa program ini sangat diharapkan oleh masyarakat di pedesaan? Hal ini karena tingkat kesejahteraan penduduk di pedesaan masih rendah dibandingkan di perkotaan. Menurut BPS, pada September 2018, Jumlah penduduk miskin Indonesia di pedesaan 15,54 juta jiwa (13,10%), sedangkan perkotaan sebesar 10,13 juta jiwa (6,89%).*



**DIMUAT DI KORAN HARIAN METRO RIAU, 8 FEBRUARI 2019**



Tidak jauh berbeda dengan tingkat kemiskinannya, kondisi kemiskinan di pedesaan juga lebih buruk. Hal ini terlihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada September 2018, Indeks kedalaman kemiskinan pedesaan sebesar 2,32 sedang perkotaan hanya 1,08, kemudian indeks keparahan kemiskinan pedesaan sebesar 0,62 sedang perkotaan sebesar 0,25.

Rendahnya kualitas kehidupan di pedesaan juga tercermin dari kondisi kesehatan masyarakatnya. Angka kesakitan penduduk pada Maret 2018 di pedesaan sebesar 15,10 sedangkan di perkotaan sebesar 12,92. Selain angka kesakitannya yang lebih tinggi, persentase penduduk di pedesaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan ternyata masih sebesar 40,83 persen.

Tidak bisa dipungkiri memang, tingkat kemiskinan yang tinggi, ditambah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan akan mendorong masyarakat

di desa berbondong-bondong pindah ke kota. Mereka beranggapan bahwa hidup di kota lebih menjanjikan dari pada hidup di desa. Tidak mengherankan jika persentase penduduk perkotaan pada tahun 2015 sekitar 53,3 persen dari total penduduk di Indonesia. Bahkan diperkirakan, pada tahun 2045, persentase penduduk di perkotaan mencapai 72,9 persen (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045).

Migrasi penduduk desa ke kota tercermin dari tingginya angka pengangguran di perkotaan. Pada Agustus 2018, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran di perkotaan sebesar 6,45 persen, sedangkan tingkat pengangguran di pedesaan hanya sebesar 4,04 persen.

Peningkatan jumlah penduduk yang bermigrasi ke kota akan menyebabkan pemerintah kota sulit memenuhi kebutuhan pendatang terutama masalah lapangan pekerjaan. Dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup bagi mereka ditambah keterbatasan keterampilan serta ijazah yang dimiliki, akan menimbulkan permasalahan



sosial di perkotaan, seperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain.

Namun demikian, program dana desa yang digulirkan pemerintah patut kita apresiasi, mengingat program dana desa telah menunjukkan hasil yang positif, diantaranya adanya penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan. Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan masih sebesar 17,10 juta jiwa atau 13,93 persen, kemudian pada September 2017 turun menjadi 16,31 juta jiwa atau 13,47 persen, ada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,79 juta jiwa. Selanjutnya, pada Maret 2018, penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 15,81 juta jiwa atau 13,20 persen, ada penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 0,5 juta jiwa selama periode September 2017-Maret 2018. Penurunan juga terjadi pada September 2018, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 15,54 juta jiwa (13,10). Selama periode Maret 2018-September 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan 262,1 ribu jiwa.

Tidak jauh berbeda dengan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan, tren membaiknya kondisi kemiskinan di perdesaan juga menunjukkan perubahan yang positif. Pada Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,49, turun menjadi 2,43 pada September 2017, turun lagi menjadi 2,37 pada Maret 2018, serta menurun kembali menjadi 2,32 pada September 2018. Indeks keparahan kemiskinan di perdesaan juga mengalami tren penurunan yang sama. Pada Maret 2017, Indeks keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,67, turun menjadi 0,65 pada September 2017, turun lagi menjadi hanya 0,63 pada Maret 2018 serta turun lagi menjadi 0,62 pada September 2018.

Program dana desa ternyata juga efektif mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota. Hal ini tercermin dengan turunnya angka pengangguran di perkotaan.

Pada Agustus 2016, tingkat pengangguran perkotaan sebesar 6,60 persen, turun menjadi 6,45 persen pada Agustus 2018.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur penunjang desa, irigasi, jembatan serta sarana lain di perdesaan seperti pasar untuk petani dan nelayan ternyata efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di perdesaan walaupun belum sepenuhnya sama dengan tingkat kemiskinan di perkotaan. Kedepan diperlukan program lanjutan atau program-program sejenis demi mewujudkan desa yang makmur dan mandiri sehingga masyarakat di perdesaan lebih sejahtera.

Namun demikian, pengawasan penggunaan dana desa tetap harus menjadi prioritas, agar tujuan utama program dana desa sesuai dengan harapan. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan dan mengurangi penduduk yang migrasi ke kota. Bahkan penduduk yang selama ini pindah ke kota akan kembali ke desa. Dengan kembalinya mereka ke desa, akan membuat kota memiliki ruang gerak yang cukup untuk memenuhi penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga lokal.

## *Peran Penduduk Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan*

Oleh : Mujiono, SE

*Saat BPS merilis angka kemiskinan yang menyentuh satu digit pada kondisi maret 2018 menjadi sebuah perdebatan hangat di masyarakat. Permasalahan perdebatan selalu sekedar angka, padahal permasalahan sebenarnya adalah apakah program penanggulangan kemiskinan telah berjalan bersinergi antara pusat dan daerah? Apakah kita melibatkan masyarakat miskin dalam penyusunan kebijakan yang telah dilakukan?*



**TERBIT DI KORAN HARIAN METRO RIAU, 11 FEBRUARI 2019**



Berkurangnya tingkat kemiskinan disuatu wilayah merupakan sebuah prestasi luar biasa. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu ukuran kinerja yang dilakukan seorang kepala daerah. Terasa sulit memang, perlu berangkat pada satu titik data yang jelas, perlu cara penanggulangan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah agar semua kepala daerah bergerak dengan data dan cara yang sama.

Tingkat Kemiskinan dan Penanggulangan

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan para pemimpin di negeri ini memiliki fokus dan strategi yang berbeda tergantung kondisi dimasa itu. Pada awal pemerintahan presiden soeharto, pemerintah memperkenalkan program rencana pembangunan lima tahun (Repelita) dimana penanggulangan kemiskinan masuk dalam program tersebut. Pada tahun 1970, jumlah penduduk miskin indonesua sebesar 70 juta jiwa atau 60 persen dari total penduduk,

dan program repelita mampu menurunkan penduduk miskin menjadi 34,5 juta jiwa pada tahun 1996. Memasuki tahun 1997-1998, indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak semakin tingginya jumlah penduduk miskin yang menyentuh 49,50 juta jiwa.

Untuk meneruskan fokus penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 sebagai dasar hukum dibentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Kemudian juga ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan inilah yang mengawali terbentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Walaupun angka yang disajikan oleh BPS menunjukkan bahwa secara nasional angka penduduk miskin mampu menyentuh diangka satu digit (9,82) persen, akan tetapi disparitas atau kesenjangan antar wilayah masih terus terjadi. Ada beberapa provinsi di Indonesia dimana tingkat kemiskinannya hanya 3-5 persen dari total penduduknya seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Bangka Belitung. Bandingkan dengan Provinsi Papua yang harus menanggung penduduk miskin sebanyak 27,74 persen, Papua Barat 23,01 persen, NTT 21,35 persen.

Mengapa Penduduk miskin masih ada dan disparitas antar wilayah terjadi? Kata kunci masalah mengapa penduduk miskin dan disparitas terjadi disebabkan karena strategi yang dilakukan tidak bersinergi antara pusat dan daerah, berjalan sendiri-sendiri serta belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Pertama, program penanggulangan kemiskinan di daerah baik Provinsi maupun di Kabupaten/Kota cenderung hanya melanjutkan program-program pemerintah seperti melaksanakan program perlindungan sosial, pemberian kredit, infrastruktur, dan mengatasi pengangguran dengan mengejar investasi. Hal ini memang perlu dilakukan, tetapi apakah program yang dilakukan sesuai dengan daerah dan efektif mampu menanggulangi kemiskinan. Sebab daerah pasti juga memiliki karakteristik penduduk miskin yang berbeda.

Kedua, sebagai efek dari tidak bersinerginya antara pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, banyak program kemiskinan berjalan sendiri-sendiri, dan lebih parahnya berangkat dengan data yang berbeda. Diperlukan cara penanggulangan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah agar kepala daerah bergerak dengan data dan cara yang

sama. Jangan biarkan kepala daerah provinsi/kabupaten terlalu berpikir inovasi tentang strategi, hal ini justru akan membuat jurang pemisah yang dalam serta disparitas antar daerah yang semakin tinggi. Daerah yang kaya akan sumber daya alam yang tinggi, kaya akan sumber daya manusia akan mampu menanggulangi kemiskinan lebih mudah, tapi bagaimana dengan daerah yang miskin sumber daya.

Ketiga, pemerintah belum melibatkan masyarakat miskin dalam penyusunan program kebijakan pengentasan kemiskinan. Melibatkan masyarakat miskin dengan bertanya apa keinginannya seharusnya dilakukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat miskin yang berada di sektor pertanian lebih membutuhkan lahan untuk bercocok tanam dari pada diberi bantuan berupa uang tunai, masyarakat miskin yang ingin berjualan tentu lebih membutuhkan gerobak/lapak untuk berjualan.

Keempat, pemerintah belum secara maksimal melibatkan masyarakat mampu dan tokoh agama dalam program pengentasan kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, potensi zakat yang bisa dikumpulkan sangat besar. Menggerakkan hati umat untuk berzakat melalui tokoh agama, kiyai, ustad, tokoh agama secara terus menerus perlu dilakukan agar mampu membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di indonesia.

Akhirnya,

Pemerintah akan dengan mudah mengentaskan kemiskinan dengan syarat bahwa pemerintah melibatkan masyarakat miskin dalam proses penyusunan program. Tersebarinya masyarakat dalam berbagai sektor mengharuskan pemerintah menanyakan secara langsung kepada tiap rumah tangga miskin tentang bantuan seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan.



Pemerintah melalui TNP2K telah memiliki basis data terpadu masyarakat miskin seluruh Indonesia. Data tersebut bisa digunakan sebagai titik dasar awal pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menyusun program. Data tersebut perlu dilakukan pemutakhiran kembali serta menanyakan kepada masyarakat miskin apa yang mereka inginkan, jika mereka di sektor pertanian dan ingin dibantu lahan pertanian, maka itu menjadi tanggung jawab kementerian pertanian beserta jajarannya dari pusat dan daerah.

Lain halnya jika mereka di sektor perikanan dan ingin dibantu sampan untuk mencari ikan, maka itu menjadi tanggung jawab kementerian perikanan dan jajarannya, atau jika mereka ingin dibantu gerobak usaha dagang, maka itu menjadi tanggung jawab kementerian perdagangan dan jajarannya dari pusat sampai dengan daerah.

Perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi bersama dengan data yang sama, cara yang sama serta dibantu oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, maka bukan suatu kemustahilan bahwa kemiskinan di Indonesia bisa diturunkan atau bahkan dihilangkan.

## *Konsumsi Rumahtangga Penyelamat PDB*

Oleh : Sri Mulyani, SST, M.Stat

*Konsumsi rumahtangga merupakan sektor terkuat penggerak ekonomi. Dengan porsi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumahtangga dianggap penyelamat pertumbuhan ekonomi 2018. Sementara ekspor neto tidak mampu mendongkrak pertumbuhan karena mengalami defisit.*



DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 18 FEBRUARI 2019

Menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) awal Februari lalu, pertumbuhan ekonomi 2018 berada pada angka 5,17 persen, belum mencapai target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Setelah dilakukan prediksi ulang menjadi 5,2 persen, tampaknya laju ekonomi masih betah berada dibawah target yang diharapkan. Perjalanan menuju visi Indonesia menjadi sepuluh ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB tahun 2030 agaknya sedikit tersendat. Namun kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,1 persen dibanding tahun lalu dinilai lumayan baik, berhubung kondisi ekonomi global saat ini juga mengalami perlambatan.

Capaian laju ekonomi ini tentu agak mengejutkan. Persoalannya, sepanjang tahun 2018 neraca perdagangan mengalami defisit yang mencapai US\$ 8,5 miliar. BPS mencatat realisasi ekspor mencapai US\$ 180,06 miliar, sementara impor tercatat US\$ 188,63 miliar. Defisit yang terjadi terutama diakibatkan

turunnya harga komoditas ekspor. Apalah jadi jika nilai ekspor jauh lebih kecil dibandingkan nilai impor, tentu sangat mengkhawatirkan. Defisit neraca perdagangan akan menguras cadangan devisa dan pada akhirnya membuat rupiah semakin tertekan.

Dibalik kekhawatiran tersebut, sektor konsumsi rumahtangga hadir mencuri perhatian karena menoreh laju di angka 5,05 persen. Angka ini menjadi prestasi baru sebab tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hebatnya, konsumsi rumahtangga tahun 2018 juga menjadi penyelamat PDB karena mampu berlaga memberi sumbangan pertumbuhan 2,74 persen, lebih dari separuh laju ekonomi yang tercipta.

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah memberi perhatian lebih pada konsumsi rumahtangga agar dapat menggenjot laju ekonomi dari sisi permintaan. Bagaimana tidak, konsumsi rumahtangga memberi porsi 56 persen dari total PDB. Kaitan dengan hal ini pula, maka penting menjaga daya beli masyarakat agar mendorong konsumsi -

rumahtangga untuk terus tumbuh.

### Inflasi Rendah dan Stabil

Menyinggung isu daya beli tentu tidak terlepas dari besaran angka inflasi. Memasuki awal tahun ini, inflasi diumumkan kembali berada pada tingkat yang rendah dan stabil. Kabar ini tentu menggembirakan terutama bagi dunia usaha, sebab harga yang rendah dan stabil akan membawa ekonomi lebih bergerak. Disisi lain, data inflasi terbaru ini juga menjadi rapor biru bagi pemerintah. Harus diakui, performa pemerintah teruji dalam menstabilkan tingkat harga. Pemerintah berkomitmen kuat menjaga stabilitas harga guna memacu pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor konsumsi rumahtangga.

Inflasi tahun 2018 berhasil dijaga pada level 3,13 persen. Secara teori, inflasi yang rendah dan stabil akan mendorong naiknya daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Dari sini dapat dinilai, inflasi yang terjaga menjadi syarat tumbuhnya konsumsi rumahtangga. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan menjaga inflasi cukup membawa konsumsi rumahtangga terus tumbuh?

### Rentan Melambat

Jika dicermati, tren laju konsumsi rumahtangga empat tahun terakhir berfluktuasi pada kisaran 5 persen. Secara triwulanan, nilai konsumsi rumahtangga berfluktuasi naik turun mengikuti pola musiman. Angkanya akan terlihat meningkat pada saat bulan Ramadan, hari raya Idulfitri dan Natal, tahun ajaran baru, serta tahun baru. Namun setelah itu, kembali normal. Perlu kehati-hatian dalam memaknai perubahan laju konsumsi rumahtangga.

Laju konsumsi rumahtangga dapat saja berubah menjadi melambat. Hal ini disebabkan jika terjadi kenaikan harga yang tinggi, terganggunya pasokan barang

konsumsi, serta pendapatan masyarakat yang tidak kunjung meningkat. Terkait dengan pendapatan, menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2018, sebanyak 30,46 persen penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian. Mereka yang bekerja di sektor pertanian rata-rata menerima upah hanya Rp1,28 juta per bulan. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan mereka yang bekerja di sektor industri yang mencapai Rp2,37 juta per bulan. Faktanya, rata-rata upah buruh tani tidak beranjak dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan atau upah adalah faktor yang paling mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin besar pendapatan atau upah maka semakin besar barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Mirisnya, ternyata hampir sepertiga penduduk Indonesia masih mempunyai pendapatan rendah dan stagnan dalam dua tahun terakhir ini. Untuk menjaga daya beli tetap saja, setidaknya pendapatan mesti meningkat minimal sebesar inflasi. Singkat kata, tanpa peningkatan pendapatan, laju konsumsi rumahtangga sangat rentan kembali melambat.

### Hilirisasi Industri

Agar laju konsumsi rumahtangga dapat terus meningkat, perlu upaya lebih bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak cukup bersandar pada porsi konsumsi rumahtangga yang besar. Sulit rasanya jika ekonomi tumbuh diatas 6 persen sementara laju konsumsi rumahtangga masih berada di angka 5 persen. Dengan logika ini, dapat dikatakan konsumsi rumahtangga berpotensi besar mendorong laju PDB, begitupun sebaliknya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah kembali fokus pada pembangunan hilirisasi industri. Kita boleh optimis bahwa adanya kebijakan hilirisasi industri akan berdampak besar bagi ekonomi.

Pembangunan industri pengolahan barang mentah menjadi barang jadi akan menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pajak. Kebijakan hilirisasi secara langsung juga akan menekan ongkos produksi dan menaikkan upah pekerja. Jika upah meningkat, secara agregat akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disisi lain, hilirisasi industri menjadi pilihan untuk memperbaiki kinerja sektor industri yang dalam tiga tahun terakhir terlihat semakin lesu. Tahun 2016, kontribusi sektor industri dalam PDB sebesar 20,52 persen, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 19,86 persen. Bahkan laju pertumbuhannya tidak sampai 5 persen. Rendahnya daya saing, masalah sumber daya manusia, ketergantungan bahan baku impor, banyaknya produk impor yang masuk ke pasar domestik, menjadi persoalan serius di sektor industri.

Ibarat sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Hilirisasi industri akan meningkatkan konsumsi rumahtangga sekaligus mendorong ekspor. Semakin terpenuhinya kebutuhan domestik dari hasil industri, semakin menurunnya ketergantungan impor. Neraca perdagangan dapat kembali surplus apalagi didukung dengan nilai jual ekspor barang jadi yang lebih tinggi. Daya saing ekspor akan semakin baik sejalan dengan bangkitnya sektor industri tanah air.

Struktur ekonomi yang didominasi konsumsi tanpa produksi akan sangat rapuh. Derasnya impor tanpa diimbangi kekuatan ekspor akan membuat laju PDB semakin terpuruk. Entah sejauh mana kemampuan konsumsi rumahtangga jadi penopang PDB. Perlu komitmen pemerintah melalui kebijakan yang tepat terkait pembangunan hilirisasi industri. Disamping itu yang tidak kalah penting adanya dukungan investasi yang memadai. Dengan demikian, dari sisi permintaan, bisa jadi penyelamat PDB ke de-

pannya tidak lagi disematkan pada sektor konsumsi rumahtangga melainkan pada sektor ekspor.

## Usaha Mikro Kecil Riau “Sebuah Realita dan Fakta”

Oleh : Mujiono, SE

Usaha Mikro Kecil merupakan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Riau. Fakta terbaru berdasarkan data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa UMK di Riau mencapai 509 ribu atau 98,26 persen dari total usaha di Riau, usaha ini tidak termasuk usaha pertanian (BPS, SE2016 Lanjutan). Realitanya dari semua usaha UMK di Riau tersebut, sebesar 88,59 persen tidak memperoleh/tidak mengajukan kredit pada bank atau lembaga keuangan. Kondisi ini diperparah bahwa 82 persen UMK di Riau mengalami kesulitan/kendala, serta 67 persen dari total UMK di Riau mengalami kesulitan permodalan.



DIMUAT DI KORAN METRO RIAU, 25 FEBRUARI 2019

U s a h a M i k r o m e n u r u t U n d a n g - U n d a n g R e p u b l i k I n d o n e s i a N o . 2 0 T a h u n 2 0 0 8 a d a l a h u s a h a p r o d u k t i f m i l i k o r a n g p e r o r a n g a n d a n / a t a u b a d a n u s a h a p e r o r a n g a n y a n g m e m e n u h i k r i t e r i a u s a h a m i k r o s e b a g a i m a n a d i a t u r d a l a m U n d a n g - U n d a n g N o . 2 0 T a h u n 2 0 0 8 . S e d a n g k a n u s a h a k e c i l a d a l a h u s a h a e k o n o m i p r o d u k t i f y a n g b e r d i r i s e n d i r i , y a n g d i l a k u k a n o l e h o r a n g p e r o r a n g a n a t a u b a d a n u s a h a y a n g b u k a n m e r u p a k a n a n a k p e r u s a h a a n a t a u b u k a n c a b a n g p e r u s a h a a n y a n g d i m i l i k i , d i k u a s a i , a t a u m e n j a d i b a g i a n b a i k l a n g s u n g m a u p u n t i d a k l a n g s u n g d a r i u s a h a m e n e n g a h a t a u u s a h a b e s a r y a n g m e m e n u h i k r i t e r i a u s a h a k e c i l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m u n d a n g - u n d a n g t e r s e b u t .

Peran UMK dalam Perekonomian Riau

UMK memiliki peran yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. UMK banyak diminati masyarakat karena dapat dilakukan secara

sederhana dan mampu menghasilkan nilai ekonomi. Itulah sebabnya kenapa UMK tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain UMK adalah ekonomi kerakyatan yang sebenarnya.

UMK juga mampu bertahan menghadapi krisis. Hal ini terbukti saat krisis ekonomi 1998, UMK tetap berdiri kokoh saat usaha-usaha besar berjatuh. UMK menjadi penopang perekonomian Indonesia saat itu. Kenapa UMK mampu bertahan?. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa UMK secara umum menghasilkan produk atau jasa yang bersifat konsumsi dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Disamping itu, UMK mampu memaksimalkan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun peralatan, dan yang paling mengagumkan, UMK menggunakan modal sendiri sehingga tidak terbebani bunga bank.

Selain mampu bertahan terhadap krisis, UMK di Riau terbukti mampu

menyerap tenaga kerja lebih dari 1,24 juta orang. Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha UMK di Riau adalah kategori usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G).

Tidak cuma itu, secara total, UMK di Riau masih mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 115 triliun rupiah, walaupun lebih dari sepertiga usaha menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun UMK di Riau mampu bertahan terhadap krisis, mampu menyerap tenaga kerja yang besar, bukan berarti UMK di Riau tidak memiliki permasalahan. Dan disinilah peran pemerintah harus tetap ada dalam upaya membina dan mengembangkan UMK di Riau.

Pertama, 88,59 persen UMK di Riau belum tersentuh oleh bank dan lembaga keuangan. Semua ini tidak terlepas dari minimnya akses mereka terhadap perbankan dan lembaga keuangan ditambah ketiadaan jaminan membuat UMK memilih menggunakan modal sendiri, dan terkadang mereka terjebak dengan keterikatan terhadap rentenir.

Kedua, UMK di Riau umumnya tidak berbadan hukum. BPS mencatat, 90,14 persen UMK di Riau tidak berbadan hukum dan 92,74 persen tidak memiliki laporan keuangan. Ketiadaan badan hukum serta tidak adanya laporan keuangan menjadi permasalahan mereka untuk mengakses bank dan lembaga keuangan.

Ketiga, 85 persen UMK di Riau mengalami kendala/hambatan, bahkan 66,73 persen mengalami kesulitan permodalan. Kendala-kendala ini mengakibatkan UMK kesulitan dalam mengembangkan usaha. Akhirnya

Mengingat begitu besarnya peran UMK dalam menggerakkan perekonomian Riau, sudah selayaknya pemerintah berperan

maksimal agar UMK mampu berkembang.

Upaya pembinaan memang penting, tapi yang lebih penting adalah pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan yang mampu meningkatkan kinerja UMK.

Regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah harus mampu membuat UMK di Riau mudah tersentuh oleh bank dan lembaga keuangan. Kita harus ingat, bahwa penjual gorengan di pinggir jalan dan usaha lainnya yang hanya menggunakan gerobak jualan juga merupakan usaha. Kapan semua usaha tersebut akan tersentuh oleh bank dan lembaga keuangan?

Dengan adanya regulasi atau peraturan yang menguntungkan para pelaku UMK, maka output atau pendapatan mereka akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka akan semakin banyak UMK di Riau yang menjadi usaha besar, dengan begitu akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

Melihat penyerapan tenaga kerja yang begitu besar, maka UMK bisa menjadi solusi pemerintah Riau dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini sangat tepat mengingat Riau sedang menghadapi era bonus demografi, dimana usia produktif atau penduduk usia muda yang sangat besar dibanding penduduk usia tua. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, maka pemerintah Riau tidak akan kesulitan dalam mengelola ledakan penduduk usia produktif tersebut. Tidak bisa dipungkiri, dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, maka akan mengurangi angka pengangguran yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.



## Siapakah Riau Tanpa Minyak Bumi dan Gas ?

Oleh : Mujiono, SE

*Disamping perkebunan kelapa sawit yang begitu luas, Provinsi Riau merupakan provinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Tidak mengherankan jika minyak bumi dan gas memberi andil yang sangat besar dalam perekonomian Riau.*



TERBIT DI MAJALAH VARIA STATISTIK, 1 MARET 2019



**M**inyak Bumi adalah bahan bakar fosil yang berbentuk cairan kental, berwarna coklat, atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi merupakan sumber energi utama dalam kehidupan manusia. Sebagian besar penyusun minyak bumi adalah senyawa alkana. Minyak bumi terbentuk dari bahan renik yang tertimbun jutaan tahun yang lalu dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tertimbun dalam kerak bumi, tekanan yang hebat dari timbunan itu dan suhu yang sangat ekstrem selama jutaan tahun membuat semuanya mencair dan terbentuklah minyak bumi. Lamanya pembentukan minyak bumi inilah yang menjadikan minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

### Produksi Minyak Bumi Riau dari Waktu ke Waktu

Fenomena menurunnya produksi minyak bumi di Riau telah terjadi sejak tahun

1970-an. BPS mencatat, pada tahun 1974, produksi minyak mentah Riau mencapai lebih dari 338 juta barel. Produksi terus mengalami penurunan hingga pada tahun 1980 dimana produksinya hanya 265 juta barel. Diantara faktor penyebab turunnya produksi adalah karena Ladang-ladang minyak yang semakin tua, disamping adanya faktor-faktor lain.

Pada tahun 1990-an, sebagai efek penemuan sumur-sumur baru, produksi minyak mentah riau mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 274 juta barel. Tren kenaikan produksi minyak terus berlanjut hingga tahun 2000 an, dimana produksi minyak mentah riau mencapai lebih dari 312 juta barel.

Dampak dari terbentuknya provinsi kepulauan Riau ditambah dengan semakin tuanya sumur-sumur minyak di Riau mengakibatkan produksi minyak mentah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, produksi minyak mentah Riau hanya sekitar 133 juta barel, dan sampai pada tahun

2017 produksinya hanya mencapai 88 juta barel.

## **Kontribusi Minyak dan Gas dalam Perekonomian Riau**

Peranan minyak bumi yang sangat besar dalam perekonomian Riau merupakan sebuah kondisi yang telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. BPS mencatat, pada tahun 1970 an, kontribusi pertambangan dan penggalian sangat mendominasi dalam perekonomian Riau. Pada tahun 1973 peranannya mencapai 80,37 persen, bahkan pada tahun 1975 pernah menyentuh rekor 88,44 persen.

Memasuki periode tahun 1980 an, kontribusi pertambangan dan penggalian tidak jauh berbeda seperti tahun 1970 an, pertambangan dan penggalian masih sangat mendominasi dalam perekonomian Riau. Pada tahun 1983, peranannya mencapai 85,37 persen. Memasuki tahun 1989, peranan sektor pertambangan dan penggalian mulai menunjukkan tren penurunan dimana pada tahun tersebut turun menjadi 74,35 persen.

Tahun 1990-an, tren penurunan peran sektor pertambangan dan penggalian semakin terlihat dalam struktur perekonomian Riau. Pada tahun 1997, sektor ini hanya menyumbang 54,11 persen, dan terus mengalami penurunan kontribusi hingga hanya 53,92 persen pada tahun 2000.

Penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian terus berlanjut hingga saat ini. Tahun 2018, bps mencatat bahwa peranan sektor pertambangan dan penggalian hanya 24,52 persen dalam struktur perekonomian Riau.

## **Upaya yang harus dilakukan**

Sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 23,63 persen tahun 2018

dalam perekonomian Riau harus menjadi tujuan arah kemandirian kita agar tidak bergantung pada minyak. Luasnya lahan di Riau harus menjadi berkah bagi masyarakat Riau. Upaya peningkatan produksi baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan terutama perkebunan harus menjadi prioritas tujuan pembangunan Riau.

Akan tetapi, upaya peningkatan produksi pertanian harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas mutu/produk yang kita hasilkan. Peningkatan kualitas hasil produk ini akan mampu memberi nilai tambah yang lebih besar bagi petani. Dengan nilai tambah yang lebih tinggi, produk-produk pertanian yang kita hasilkan akan mampu berdaya saing baik dikancah lokal maupun internasional.

Disamping itu, tingginya peran atau dominasi kelapa sawit dalam perekonomian Riau disatu sisi menguntungkan, akan tetapi sangat tidak sehat dan membayakan perekonomian Riau. Efek dominasi kelapa sawit akan sangat terasa dampaknya ketika harga tandan buah segar kelapa sawit (TBS) turun dengan berbagai alasan sehingga para petani Riau menurun kesejahteraannya sebagai akibat berkurangnya pendapatan mereka.

Fenomena turunnya harga tanda buah segar kelapa sawit (TBS) harus menjadi catatan serius pemerintah bahwa kita tidak boleh hanya memiliki satu produk unggulan. Kita harus memiliki tanaman lain yang menjadi sektor produk unggulan. Semakin banyak produk unggulan yang kita miliki, maka semakin besar pula sumber-sumber pendapatan petani yang pada akhirnya akan memperkokoh struktur perekonomian kita.

Upaya lain yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Riau adalah mensejahterakan petani. Kenapa hal ini begitu penting?. Kita tidak akan mungkin mampu menjadikan sektor pertanian jika para petani kita tidak sejahtera. Hal yang sering terjadi adalah dalam pemasaran produk-produk hasil



pertanian dimana adanya kesenjangan dalam pembagian keuntungan antara tengkulak dengan petani. Disinilah peran pemerintah untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi pertanian sehingga petani-petani kita tidak menjadi pihak yang lemah atau yang paling sedikit mendapat keuntungan dibanding distributor/tengkulak.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga patut menjadi prioritas pembangunan sebagai langkah agar kita tidak bergantung pada minyak. Sektor perdagangan ini menyumbang sebesar 9,78 persen terhadap perekonomian Riau tahun 2018. Bahkan hasil sensus ekonomi BPS, jumlah usaha/perusahaan di Riau sebanyak 52,07 persen usaha/perusahaan di Riau bergerak pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G).

Mengingat begitu besarnya peran sektor perdagangan dalam menggerakkan perekonomian Riau, sudah selayaknya pemerintah berperan maksimal agar sektor perdagangan mampu berkembang. Upaya pembinaan memang penting, tapi yang lebih penting adalah pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan yang mampu meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

### Akhirnya

Adanya penurunan produksi minyak di Riau yang diperparah dengan turunnya harga minyak mentah di pasaran internasional harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Riau. Permasalahan ini bukan hanya siap atau tidak siap, akan tetapi merupakan kenyataan yang memang harus dihadapi. Jangan sampai negeri Riau Lancang Kuning ini tiada lagi terbilang karena habis kekayaan alamnya. Jangan sampai kita mewariskan generasi penerus dengan segala permasalahan kerusakan alam yang hanya menjadi beban mereka. Upaya dan langkah kongkrit harus segera dilakukan oleh

pemerintah provinsi Riau. Upaya menghapus dominasi dan ketergantungan kita terhadap minyak sedikit sedikit harus kita mulai sejak dini.

Disamping itu, upaya mencari dan menggali potensi-potensi ekonomi diluar minyak harus terus menerus dilakukan. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat minyak Riau dari waktu ke waktu produksinya cenderung menurun, bahkan suatu masa akan habis. Jangan sampai negeri kita yang kaya ini redup dan tiada terbilang karena tiada lagi sumber daya yang kita dimiliki. Jika kita tidak mulai hari ini, lantas kapan lagi dan apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita.

## *Mewaspadaai Penuaan Penduduk (Aging Population) Indonesia*

Oleh : Mujiono, SE

*Indonesia saat ini sedang menikmati era kesempatan demografi. Bonus demografi ini telah kita nikmati sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2020 an, sehingga masa menikmati kesempatan bonus demografi ini tinggal menghitung tahun. Fenomena lanjutan yang harus kita waspadaai dan kita hadapi adalah adanya tren peningkatan jumlah lansia atau penuaan penduduk. Kenapa peningkatan jumlah penduduk lansia ini perlu diwaspadaai dan menjadi perhatian serius? Hal ini tidak terlepas bahwa bonus demografi saat ini masih menyisakan 7 jutaan tenaga kerja yang masih belum terserap atau masih menganggur, dimana hampir 10 persennya adalah pengangguran yang sudah berumur 45 tahun keatas.*

**DIMUAT DI KORAN METRO RIAU, 25 APRIL 2019**



fi

**D**isamping masih adanya masalah pengangguran, penanggulangan kemiskinan di Indonesia juga masih menyisakan 25,67 juta penduduk miskin. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah rata-rata usia kepala rumah tangganya sudah berumur 47 tahun dan sebentar lagi mereka akan memasuki masa tua.

Masih adanya penduduk pra lansia yang belum bekerja ditambah kondisi kemiskinan penduduk Indonesia yang sudah mendekati masa lansia akan membuat mereka tidak mampu menyiapkan masa tuanya dengan baik. Kondisi ini akan mengakibatkan para lansia hidup kurang sehat, tidak aktif dan tidak produktif. Kondisi lansia yang jauh dari kata sehat dan mapan akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan baik kesehatan, ekonomi, sosial dan lain-lain.

Penduduk lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60

tahun keatas menurut undang-undang No. 13 tahun 1998. Peningkatan jumlah lansia diantaranya disebabkan adanya baby boom yang terjadi beberapa puluh tahun lalu. BPS memperkirakan pada tahun 2045, jumlah lansia akan mencapai 63,31 juta atau 20 persen dari jumlah penduduk. Bahkan PBB menyebutkan, penduduk lansia Indonesia pada tahun 1950 mencapai 74 juta jiwa atau 25 persen dari total populasi. Selama kurun waktu hampir 50 tahun (1971-2018), persentase lansia di Indonesia meningkat dua kali lipat. Saat ini lansia di Indonesia mencapai 24,49 juta orang atau hampir 10 persen dari total penduduk.

Percepatan penyiapan lapangan pekerjaan dan program-program penanggulangan kemiskinan harus terus menerus dilakukan. Percepatan program-program ini bukan tanpa alasan, semua dilakukan agar para pra lansia mampu

berbenah dan bersiap diri menghadapi masa tuanya.

Pertama, hampir 10 persen pengangguran di Indonesia telah berumur 45 tahun ke atas. Kondisi ini diperparah dimana 34 persen dari total pengangguran di Indonesia hanya berpendidikan sampai tingkat sekolah menengah pertama ke bawah, bahkan masih ada 18 persen pengangguran di Indonesia yang tidak pernah sekolah SD, tidak tamat SD serta hanya menamatkan sekolah dasar. Kondisi ini akan menyulitkan mereka untuk bersaing dalam pasar kerja karena rendahnya tingkat pendidikannya.

Kedua, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin di Indonesia telah mencapai usia 47 tahun. Kondisi ini diperparah dengan hasil potret BPS pada tahun 2017, bahwa masih ada 37,44 persen kepala rumah tangga miskin di Indonesia yang tidak tamat SD, 37,46 persen hanya tamat sekolah dasar, serta 13,52 persen berpendidikan setingkat SMP. Kondisi ini juga menyulitkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Perlu di gesa program-program yang memutus rantai kemiskinan agar generasi penerusnya mampu keluar dari kemiskinan.

Ketiga, kesehatan merupakan kebutuhan pokok untuk lansia. Panjangnya lama hidup lansia tidak berarti jika lansia sakit-sakitan sehingga tidak mampu beraktivitas secara maksimal. Susenas 2018 BPS menggambarkan bahwa 50 persen lansia di Indonesia mengalami keluhan kesehatan dan persentasenya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur lansia. Angka kesakitan lansia di Indonesia tahun 2018 adalah 25,99 persen, artinya setiap 100 lansia terdapat 26 orang lansia yang sakit.

Keempat, satu dari dua lansia di Indonesia masih bekerja. Lansia bekerja merupakan fenomena yang kerap terjadi. Fakta menunjukkan 44,79 persen lansia masih bekerja, dan 47,59 persen lansia yang bekerja di Indonesia tidak tamat sekolah

dasar, serta 33,50 persen lansia yang bekerja hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Kondisi upah pekerja lansia juga sangat minim, BPS mencatat tahun 2018 sebesar 48,32 persen lansia yang bekerja memperoleh pendapatan/upah/gaji kurang dari satu juta per bulan, padahal lansia memiliki hak untuk mendapatkan upah/gaji/pendapatan yang layak untuk menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

### Akhirnya

Upaya pemerintah untuk menggesa pembangunan yang berbasis kerakyatan harus terus menerus dilakukan. Upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru sangat diperlukan agar semua penduduk usia produktif dapat terserap dalam dunia kerja yang pada akhirnya mereka mampu mempersiapkan masa tuanya dengan lebih baik, lebih sehat dan lebih berkualitas.

Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan penduduk harus tetap menjadi prioritas pembangunan. Program seperti program keluarga harapan dan program lain yang sejenis harus terus menerus dilakukan agar rantai kemiskinan dapat kita putus sehingga generasi yang dilahirkan mampu keluar dari kemiskinannya.

Program-program terkait pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah seperti penguatan pelayanan kesehatan fasilitas puskesmas serta sarana dan prasarana, optimalisasi JKN KIS dan program-program lain harus terus menerus dilakukan. Disamping program kesehatan, program-program untuk lansia seperti family support, pelayanan sosial kedaruratan untuk lansia, rumah layak huni bagi lansia juga tetap harus menjadi prioritas pemerintah.

Dengan program-program yang positif untuk lansia, kita berharap lansia Indonesia berada dalam keadaan sehat, aktif dan mandiri. Jika masyarakat lansia memiliki persiapan yang matang, penuaan penduduk

dapat menjadi hal-hal yang menguntungkan. Kita akan mampu memanfaatkan potensi-potensi penduduk lansia yang pada akhirnya kita akan mendapatkan keuntungan jangka panjang karena penduduk usia tua tetap mampu produktif lebih lama. Jika semua lansia sehat, aktif dan produktif, maka penuaan penduduk (aging population) di Indonesia akan berdampak positif dalam memperkokoh perekonomian bangsa ini.

<https://riau.bps.go.id>



## *Jalan Terjal Wanita Indonesia Menuju Kesenjangan Gender*

Oleh : Mujiono, SE

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki atau biasa disebut kesenjangan gender di Indonesia menjadi isu menarik dan hangat baik di media cetak maupun elektronik. Kenapa permasalahan ini begitu menarik? Salah satu tujuan dalam SDG's (Sustainable Development Goals) diantaranya adalah adanya kesenjangan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan sasaran menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Akan tetapi sampai hari ini fakta menunjukkan upaya penyeteraan gender di Indonesia masih harus melalui jalan terjal berupa persoalan kualitas kehidupan perempuan dimana perkawinan perempuan usia anak yang masih tinggi yaitu sebesar 11,2 persen, kondisi ini memiliki arti satu dari sembilan perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.



DIMUAT DII BERTUAH POS.COM, TANGGAL 4 MEI 2019

Disamping kondisi diatas, pernikahan dini ternyata telah memupus harapan perempuan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun paling banyak hanya menamatkan pendidikan SMP/ sederajat (44,9 persen), Susenas BPS 2018.

Perkawinan perempuan usia anak yang terjadi di Indonesia mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan yang mereka peroleh. Kondisi ini telah menghapus kesempatan emas mereka untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara mandiri, memperkecil peluang perempuan untuk mampu setara dengan lelaki. Kondisi ini belum ditambah dengan segudang problematika seperti sulitnya mereka terserap dalam pekerjaan formal sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan

yang pada akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah perkawinan perempuan usia anak sangat mengancam kesehatan perempuan dan anak. Kondisi anak yang dilahirkan bisa mengalami gizi buruk dan stunting serta rentan mengalami kematian ibu muda melahirkan (maternal mortality).

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, praktik pernikahan anak diseluruh dunia juga terjadi. Proporsi wanita muda yang menikah saat masih anak-anak mencapai 25 persen. Artinya satu dari lima perempuan muda di dunia menikah saat masih anak-anak. Jumlah pengantin anak diperkirakan mencapai 650 juta, termasuk pengantin anak perempuan yang dibawah 18 tahun yang sudah menikah, dan wanita dewasa yang menikah pada masa kanak-kanak. Jumlah

terbanyak terdapat di Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika.

Perkawinan usia anak akan memiliki dampak dan ancaman kelangsungan suatu generasi. Seorang anak perempuan yang dinikahkan pada usia belia akan menghapus harapannya untuk melanjutkan pendidikannya. Kurangnya pengetahuan dan diperparah tingkat emosional yang belum stabil juga menambah mereka rawan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mengkaji tingkat perkawinan perempuan anak di tingkat provinsi lebih membuat kita terperangah. Dalam perjalanannya, jika secara nasional angka perkawinan perempuan usia anak sebesar 11,2 persen, ternyata terdapat 20 provinsi di Indonesia yang angka perkawinan perempuan usia anak di atas angka nasional. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan persentase perkawinan usia anak tertinggi yang mencapai 19,4 persen, disusul Kalimantan Tengah sebesar 19,1 persen. Sedangkan persentase perkawinan usia anak terendah dipegang oleh provinsi DKI Jakarta yang hanya sebesar 4,1 persen.

Tidak bisa dipungkiri, kondisi suatu wilayah, baik topografi, tingkat ekonomi, serta kebiasaan atau adat sangat berpengaruh terhadap masih tingginya perkawinan anak. Hal ini terlihat perkawinan usia anak di perdesaan lebih besar dua kali lipat dibanding perkotaan. Angka perkawinan anak di perdesaan mencapai 16,87 persen, sedangkan di perkotaan hanya 7,15 persen.

Disamping itu, perkawinan perempuan pada usia anak yang terjadi menyisakan problematika lanjutan yang harus dihadapi perempuan. Kondisi jiwa dan tingkat emosi yang belum stabil ditambah minimnya pengetahuan mereka tentang ilmu berumah tangga membuat mereka rentan mengalami konflik dan berujung pada perceraian. BPS mencatat, pada tahun 2018, perempuan yang menikah pada usia anak-

anak ternyata mengalami perceraian hidup sebesar 5 persen.

Melihat fenomena di atas, pemerintah harus secara tegas memberlakukan undang-undang yang menaikkan ambang batas minimal usia menikah bagi perempuan. Pengawasan terhadap adanya upaya menaikkan umur perempuan saat mendaftarkan pernikahan juga harus dilakukan. Langkah pengawasan ini juga harus dibarengi dengan sanksi yang tegas bagi siapapun yang berupaya mendaftarkan umur perempuan yang tidak sebenarnya sehingga lolos dan mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan.

Selain itu, upaya mengikis dan menghapus stigma dimasyarakat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya di dapur harus terus menerus dilakukan. Kondisi di atas harus dirubah pola berpikirnya bahwa menyekolahkan anak perempuan tinggi-tinggi adalah keharusan agar perempuan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tidak kalah dengan lelaki.

Besar harapan kita, dengan menaikkan ambang batas usia menikah, setidaknya perempuan akan lebih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan perempuan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, maka perempuan-perempuan Indonesia akan mampu dan berkesempatan ikut bersaing serta memiliki peluang yang sama dengan lelaki dalam berbagai segi kehidupan. Dengan mereka mampu bersaing dan memiliki kemampuan, maka kesetaraan gender perempuan dan lelaki di Indonesia dapat segera tercapai. Semoga



## *Modal Sosial dalam Pergulatan Pesta Demokrasi*

Oleh : Mujiono, SE

Walaupun perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024 telah usai, suhu perpolitikan di Indonesia ternyata masih terasa hangat. Gesekan dan konflik di masyarakat sering kali terjadi akibat hoaks atau berita palsu yang menyesatkan, kondisi ini diperparah dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau informasi untuk mencari kebenarannya. Informasi-informasi yang menyesatkan akan semakin memperkeruh suasana di masyarakat dan pada akhirnya akan memperparah kondisi modal sosial yang saat ini sudah terbangun. Kondisi ini akan membuat masyarakat akan semakin saling tidak percaya dan toleransi antar umat beragama semakin menurun. Padahal kita semua sepakat, pembangunan tidak akan terwujud tanpa didukung dengan kondisi modal sosial yang baik. Bagaimana kondisi modal sosial di Riau dan kenapa kita harus mewaspadainya?



TERBIT DI MEDIA ONLINE BERTUAHPOS.COM, 16 JUNI 2019

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar individu sehingga besaran modal sosial sangat bergantung pada kemampuan dalam hubungan sosial atau kapabilitas sosial individu. Pada umumnya, para ahli memandang modal sosial setara dengan modal pembangunan lainnya yaitu modal ekonomi dan modal manusia. Modal sosial bahkan tidak jarang dilihat sebagai katalisator atau perekat yang memungkinkan modal-modal pembangunan lainnya bekerja saling memperkuat untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien.

### Kondisi Modal Sosial Riau

Rasa percaya merupakan unsur utama pembentuk modal sosial. Tanpa adanya rasa percaya antar individu, maka

akan sulit terjadi hubungan sosial yang baik di masyarakat. Rasa percaya merupakan perwujudan dari modal sosial kognitif yang dapat tercermin dari persepsi sikap percaya individu terhadap anggota dalam suatu komunitas. Pada lingkup masyarakat desa, sikap percaya tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari antar anggota masyarakat. Selain itu juga akan tercermin dari sikap toleransi antar anggota masyarakat yang tergambar dalam kerukunan hidup dimasyarakat.

BPS mencatat, sikap percaya rumah tangga di Riau terhadap tokoh di lingkungan tempat tinggal mereka bervariasi. Sikap percaya terhadap aparat desa/kelurahan sebesar 73,18 persen, sikap percaya terhadap tokoh masyarakat sebesar 85,15 persen. Sedangkan sikap percaya terhadap tokoh agama sebesar 88,47 persen.

Hubungan antar tetangga

merupakan salah satu bentuk hubungan sosial sehari-hari serta dilakukan antar anggota masyarakat yang mempunyai posisi setara dalam struktur sosial. Sikap percaya antar tetangga sangat beragam dan mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya atau sosial di daerahnya masing-masing. BPS mencatat, bahwa 78,39 persen rumah tangga di riau percaya menitipkan rumah mereka kepada tetangganya saat berpergian, serta 55,66 persen percaya menitipkan anak usia 1-12 tahun pada tetangganya.

Disamping itu, toleransi juga merupakan salah satu perwujudan modal sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat. Toleransi dalam sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa dan agama yang dilakukan oleh masyarakat. BPS menggambarkan bahwa masyarakat riau yang setuju dengan kegiatan suku lain sebesar 86,17 persen, sedangkan masyarakat yang setuju dengan kegiatan agama lain hanya sebesar 46,65 persen.

Komponen lain pembentuk modal sosial yang yang tidak kalah menarik adalah budaya tolong menolong sesama masyarakat. Rumah tangga di riau yang bersedia membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan sebesar 63,36 persen.

Mewaspadai isu-isu negatif yang menyebabkan adanya konflik di masyarakat dan pada akhirnya akan menghancurkan kondisi sosial yang telah terbangun bukanlah tanpa alasan.

Pertama, rasa percaya masyarakat riau terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat tinggi yaitu 85,15 persen dan 88,47 persen. Tingginya rasa percaya ini adalah suatu anugerah, akan tetapi akan menjadi suatu petaka apabila tokoh masyarakat/agama lalai memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Kedua, isu toleransi agama

merupakan isu yang sangat berbahaya. BPS mencatat 53,35 persen rumah tangga di riau kurang setuju atau tidak setuju dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh agama lain di lingkungan tempat tinggalnya. Disamping itu, 76,45 persen rumah tangga di riau juga riau kurang atau tidak setuju dengan adanya tempat ibadah yang sudah ada/akan dibangun di tempat tinggalnya. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa 26,30 persen rumah tangga di riau kurang atau tidak setuju jika anaknya bergaul dengan anak yang berbeda agama.

### Harapan Kita

Upaya menjaga riau agar tetap menjadi wilayah yang damai dan nyaman harus menjadi tujuan utama serta menjadi tanggung jawab kita semua. S e b a g a i masyarakat kita harus mampu memilah informasi dengan benar serta bijak dalam mensikapinya. Menelusuri informasi dengan menjaring informasi yang benar sangat diperlukan mengingat banyaknya berita bohong/hoaks yang beredar.

Selain itu, mengingat besarnya harapan masyarakat riau yang ditandai dengan tingginya rasa percaya masyarakat terhadap aparaturnegara, tokoh masyarakat dan tokoh agama, maka sudah seharusnya aparaturnegara serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama menjadi teladan di masyarakat. Aparaturnegara serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama adalah cermin bagi masyarakat, sehingga segala ucapan dan tingkah laku mereka akan selalu dilihat. Disinilah pentingnya mereka untuk terus berupaya menjaga persatuan di masyarakat. Mengingat suasana politik yang masih memanas, sekali saja aparaturnegara/tokoh masyarakat atau tokoh agama memberikan statemen yang negatif, maka pengaruhnya akan sangat besar di masyarakat.

Terkait isu suku dan agama merupa



kan isu yang sangat rentan dan berbahaya dan harus menjadi prioritas utama. Meningkatkan kewaspadaan terhadap isu agama sangatlah penting mengingat isu ini merupakan isu sensitif dan mampu memecah belah persatuan kita.

Pemerintah harus menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa demokrasi berjalan lancar, jujur dan damai sehingga tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kita harus bersinergi bersama menjaga agar isu-isu negatif/hoaks tidak beredar di masyarakat. Isu-isu akan menyebabkan konflik yang pada akhirnya akan menghancurkan modal sosial yang telah terbangun. Kita harus sepakat bahwa kita tidak akan mampu membangun riau yang makmur tanpa didukung dengan kehidupan yang rukun, aman dan damai di masyarakat.

<https://riau.bps.go.id>

## *Bijak Dengan Kelapa Sawit*

Oleh : Mujiono, SE

*Walaupun pada tahun 2018 sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 22,44 persen atau sebesar 169,49 triliun rupiah dalam perekonomian riau yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, ternyata sebagian besar dihasilkan dari sub sektor perkebunan.*

*Dominasi sub sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian riau disatu sisi merupakan berkah yang luar biasa, akan tetapi juga menjadi permasalahan serius bagi pemerintah riau serta masyarakat disaat harga tandan buah segar kelapa sawit mengalami penurunan. Penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit sangat berpengaruh pada para petani kelapa sawit karena semakin menurunnya pendapatan yang diperoleh sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan petani kelapa sawit tetap tinggi. Langkah bijak seperti apa yang harus segera kita lakukan?*



**TAYANG DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, TANGGAL 19 JULI 2019**

Luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencatat pertumbuhan yang spektakuler. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, luas kelapa sawit riau pada tahun 2010 hanya berkisar 1,6 juta hektar, akan tetapi pada tahun 2018 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan mencapai kisaran 2,74 juta hektar atau lebih dari 30 persen dari luas riau. Selain itu, seiring dengan peningkatan luas kelapa sawit, nilai ekspor minyak kelapa sawit yang tercermin pada ekspor hasil industri lemak dan minyak hewan/nabati di riau juga mengalami peningkatan. Hasil potret BPS, nilai ekspor hasil industri lemak dan minyak hewan/nabati riau pada tahun 2018 mencapai 8 milyar US \$ atau mencapai 50 persen dari total nilai ekspor riau.

Namun, kenaikan luas perkebunan kelapa sawit dan tingginya ekspor minyak kelapa sawit di riau serta besarnya kontribusi tanaman perkebunan sebesar 12,88 persen pada tahun 2018 ternyata belum sepenuhnya membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat riau. Hal ini disebabkan karena masyarakat riau sebagian besar hanya mengandalkan pada satu produk unggulan yaitu kelapa sawit.

Rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit harus menjadi momen bagi pemerintah provinsi riau untuk melakukan kebijakan arah kemandirian kita agar tidak bergantung pada kelapa sawit. Tingginya peran atau dominasi kelapa sawit dalam perekonomian riau disatu sisi menguntungkan, akan tetapi sangat tidak

sehat dan membayakan perekonomian riau. Efek dominasi kelapa sawit akan sangat terasa dampaknya ketika harga tandan buah segar kelapa sawit (TBS) turun dengan berbagai alasan sehingga para petani menurun kesejahteraanya sebagai akibat berkurangnya pendapatan mereka.

### Langkah Bijak Kedepan...

Fenomena turunnya harga tanda buah segar kelapa sawit (TBS) harus menjadi catatan serius pemerintah bahwa kita tidak boleh hanya memiliki satu produk unggulan. Upaya mengarahkan petani agar berinovasi dengan memiliki tanaman lain yang menjadi produk unggulan serta mampu berdaya saing harus segera digesa pemerintah. Semakin banyak produk unggulan yang kita miliki, maka semakin besar pula sumber-sumber pendapatan petani yang pada akhirnya akan memperkokoh struktur perekonomian kita.

Akan tetapi, upaya tersebut harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas mutu/produk yang kita hasilkan, terutama hilirisasi produk-produk pertanian. Peningkatan kualitas hasil produk ini akan mampu memberi nilai tambah yang lebih besar bagi petani. Dengan nilai tambah yang lebih tinggi, produk-produk pertanian yang kita hasilkan akan mampu berdaya saing baik dikancah lokal maupun internasional.

Upaya lain yang harus menjadi perhatian serius pemerintah adalah mensejahterakan petani. Kenapa hal ini begitu penting?. Kita tidak akan mungkin mampu mengarahkan para petani untuk berinovasi dan menghasilkan produk-produk unggulan sektor pertanian jika para petani kita tidak sejahtera. Hal yang sering terjadi adalah adanya kesenjangan dalam pembagian keuntungan antara tengkulak dengan petani. Upaya mengikis kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali koperasi-koperasi pertanian sehingga mampu membeli produk yang dihasilkan

petani. Dengan tertampungnya hasil para petani melalui koperasi, para petani kita tidak menjadi pihak yang lemah atau yang paling sedikit mendapat keuntungan dibanding distributor/tengkulak.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga patut menjadi prioritas pembangunan sebagai langkah agar kita tidak bergantung pada minyak. Sektor perdagangan ini menyumbang sebesar 9,78 persen terhadap perekonomian Riau tahun 2018. Bahkan hasil sensus ekonomi BPS, jumlah usaha/perusahaan di Riau sebanyak 52,07 persen usaha/perusahaan di Riau bergerak pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G).

Mengingat begitu besarnya peran sektor perdagangan dalam menggerakkan perekonomian Riau, sudah selayaknya pemerintah berperan maksimal agar sektor perdagangan mampu berkembang. Upaya pembinaan memang penting, tapi yang lebih penting adalah pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan yang mampu meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

### Akhirnya

Adanya fenomena penurunan harga tandan buah segar (tbs) kelapa sawit yang diperparah dengan semakin menurunnya produksi yang dihasilkan para petani kelapa sawit sebagai dampak semakin menuanya usia tanaman mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi riau. Permasalahan ini akan terus menerus dihadapi masyarakat selagi para petani kita hanya mengandalkan sumber pendapatan dari kelapa sawit. Oleh karenanya, upaya kongkrit mengurangi dominasi dan ketergantungan kita terhadap kelapa sawit dengan mengarahkan petani-petani kita agar berinovasi dengan menanam tanaman-tanaman lain yang produktif harus kita mulai sejak dini.

Disamping itu, upaya mengarahkan

agar petani berinovasi dengan menanam tanaman lain selain kelapa sawit harus diberengi langkah pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk-produk yang dihasilkan serta menjamin bahwa produk yang dihasilkan petani nantinya akan terserap oleh pasar. Hal ini sangat penting dilakukan agar produk yang dihasilkan petani membawa dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

<https://riau.bps.go.id>



## *Harga Cabai Merah yang Semakin Pedas*

Oleh : Mujiono, SE

*Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, cabai merah selalu menjadi komoditas yang menyumbang inflasi di Riau. Kenapa cabai merah selalu menyebabkan inflasi di Riau?*



TERBIT DI MEDIA GORIAU.COM, 5 AGUSTUS 2019



Menurut Bank Indonesia, Inflasi merupakan suatu keadaan meningkatnya harga produk/jasa disuatu wilayah pada periode tertentu yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah meningkatnya konsumsi atau permintaan masyarakat terhadap produk tersebut. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam

mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

### **Sumbangan Cabai Merah pada Inflasi Riau**

Fenomena cabai merah yang selalu menjadi penyebab utama inflasi di Riau telah terjadi sejak tahun 2016. Pada Maret 2018, cabai merah mengalami kenaikan harga dengan menduduki peringkat pertama dalam top ten komoditas penyumbang inflasi Riau dengan sumbangan sebesar 0,28 persen. Sama dengan kondisi 2016-2017, bulan Agustus – Oktober tahun 2018 cabai merah juga menduduki peringkat pertama penyebab inflasi Riau. Pada bulan Agustus cabai merah

menyumbang inflasi sebesar 0,23 persen, September 0,07 persen, kemudian pada Oktober sebesar 0,41 persen.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2018, cabai merah kembali membuat gelisah masyarakat Riau pada tahun 2019. Fenomena cabai merah kembali mengukir prestasi dengan selalu menduduki peringkat pertama dalam top ten komoditas penyumbang inflasi Riau. Jika pada bulan April 2019 cabai merah hanya menyumbang inflasi sebesar 0,13 persen, maka pada bulan Juni dan Juli 2019 cabai merah mampu menyentuh rekor sebesar 0,82 persen dan 0,63 persen.

Kenaikan harga cabai merah selalu menjadi topik hangat serta menjadi isu utama di media cetak dan elektronik di Riau. Kenapa harga cabai merah tidak stabil dan cenderung naik tinggi serta selalu menyumbang inflasi?. Kata kunci terjadinya kenaikan harga pada komoditas tersebut terletak pada ketersediaan cabai merah belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat Riau.

Pertama, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap cabai merah sangat tinggi. Tersedianya komoditas ini di rumah tangga menjadi keniscayaan. Realita menunjukkan, ketersediaan cabai merah di pasaran terkadang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, bahkan kelangkaan terjadi sehingga mengakibatkan harga komoditas ini melambung.

Kedua, produksi cabai merah di Riau belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan produksi yang cukup menjadi suatu keharusan di suatu wilayah mengingat komoditas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Data BPS berdasarkan survei pertanian hortikultura menunjukkan bahwa produksi cabai merah besar tahun 2018 hanya sebesar 17 323,9 ton.

Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga di Riau berkisar 1,6 juta rumah

tangga. Produksi pada tahun 2018 ini hanya mampu memenuhi sekitar 10,6 kg per tahun per rumah tangga, atau hanya sebesar 0,88 kg per bulan per rumah tangga dan belum termasuk kebutuhan cabai merah oleh hotel, restoran dan rumah makan serta penyedia jasa akomodasi lainnya yang ada di Riau. Ketiga, jalur distribusi antar wilayah masih belum stabil. Permasalahan cuaca sangat berpengaruh pada lancarnya jalur distribusi dari daerah penghasil menuju wilayah Riau. Jalan yang rusak, banjir dan longsornya jalan sangat menentukan lancarnya pasokan cabai merah dipasaran. Akhirnya, mengingat bahwa produksi kita belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri sebagai akibat dari konsumsi masyarakat yang tinggi, gagal panen dan lain-lain, maka sudah seharusnya pemerintah Provinsi Riau melalui dinas-dinas terkait mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menjaga agar stok cabai merah cukup dan mudah didapatkan masyarakat dengan harga yang murah. Peningkatan produksi cabai merah dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif yang tersebar di wilayah Riau. Disamping itu, upaya penyediaan bibit unggul, bantuan pupuk serta bimbingan melalui dinas terkait kepada masyarakat sangat diperlukan agar produksi cabai merah meningkat. Upaya menumbuhkan budaya masyarakat menanam cabai merah dan tanaman lain pada halaman rumah perlu digalakkan kembali. Semakin banyak masyarakat yang menanam setidaknya mengurangi kebutuhan masyarakat dipasaran, sehingga permintaan akan cabai merah menurun. Selain itu, jalan penghubung antara Provinsi Riau dengan Provinsi tetangga harus tetap dijaga agar tetap lancar dan bebas hambatan. Kebijakan perbaikan jalan yang rusak baik disebabkan oleh banjir dan longsor serta faktor-faktor lain harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Riau melalui



dinas-dinas terkait agar jalur distribusi tetap lancar. Dengan lancarnya transportasi, maka pasokan cabai akan cukup dan murah serta mudah diperoleh masyarakat. Semoga

<https://riau.bps.go.id>

## *Kisah Nenek Sahnun dan Memudarnya Modal Sosial kita*

Oleh : Mujiono, SE

*Seorang nenek pemulung berusia 60 tahun membuat publik terharu dengan kebaikan hatinya.*

*Dikutip dari Tribun Mata-ram (2/8/2019), nenek bernama Sahnun memberikan uang senilai 10 juta untuk Idul Adha tahun ini. Nenek Sahnun sehari-harinya mengumpulkan sampah untuk dijual. Dirinya tinggal sebatang kara tidak memiliki rumah di Mataram dan keluarganya berasal dari Narmada, Lombok Barat. Nenek Sahnun pun menumpang tidur di sebuah kios di samping barat Mal Mataram, Nusa Tenggara Barat.*



*Kisah seorang nenek pemulung yang mampu menyumbang 10 juta Rupiah untuk berkorban begitu menghebohkan masyarakat Indo-nesia. Kisah ini begitu fenomenal dan luar biasa mengingat nenek Sahnun yang telah berusia senja bukanlah seorang nenek jutawan, akan tetapi hanya seorang pemulung yang hidup sebatang kara dan hanya berteduh dengan menumpang pada sebuah kios milik warga. Kenapa kisah ini begitu fenomenal dan makna seperti apa yang harus kita petik demi meningkatkan indeks modal sosial kita?*

**TERBIT DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, 23 AGUSTUS 2019**

**M**odal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar individu sehingga besaran modal sosial sangat bergantung pada kemampuan dalam hubungan sosial atau kapabilitas sosial individu. Pada umumnya, para ahli memandang modal sosial setara dengan modal pembangunan lainnya yaitu modal ekonomi dan modal manusia. Modal sosial bahkan tidak jarang dilihat sebagai katalisator atau perekat yang memungkinkan modal-modal pem-bangunan lainnya bekerja saling memperkuat untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien.

Berkurban merupakan sebuah ibadah yang dilakukan umat muslim seluruh

dunia. Berkurban disamping merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta, berkorban juga merupakan wujud kepedulian kita kepada sesama. Kisah nenek Sahnun yang mampu berkorban dengan uang yang begitu besar telah menyentuh dan menyadarkan diri kita bahwa begitu besar kepedulian beliau kepada sesama. Sebagai masyarakat yang hanya berprofesi sebagai pemulung, jalan kehidupannya mungkin tidaklah semulus yang kita bayangkan. Masih banyak sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa profesi pemulung adalah profesi yang kotor atau pun menjijikkan, bahkan sering pula kita lihat tulisan peringatan larangan dipinggir jalan bahwa ” pemulung dilarang masuk”. Tetapi semua itu

tidak menyurutkan niat nenek sahnun untuk terus peduli pada sesama.

Nenek Sahnun mungkin bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, namun sifat budi pekertinya yang begitu mulia tidaklah sebanding dengan kita yang mungkin berpendidikan tinggi dan mungkin setiap waktu selalu berdasi. Kenapa kisah nenek Sahnun ini harus kita jadikan model dalam kehidupan kita. Semua ini tidak terlepas bahwa kondisi hidup bermasyarakat sebagian masyarakat kita semakin mengendur, rasa percaya kita kepada orang lain semakin menurun, kondisi ini semakin diperparah dengan jiwa tolong menolong sebagian masyarakat kita yang juga semakin menurun.

Pesta demokrasi yang notabene adalah suatu proses pendewasaan kita terhadap politik dengan berdemokrasi, ternyata mau tidak mau telah membuat masyarakat kita menjadi terkotak-kotak sebagai efek dari pilihan yang berbeda. Kondisi diatas semakin membuat modal sosial yang telah kita bangun dan perkuat semakin memudar. Jika kita tidak waspada, seiring waktu modal sosial kita akan jatuh pada titik terendah yang tentunya sangat tidak kita harapkan, padahal kita sepakat bahwa modal sosial yang baik akan mendukung proses pembangunan semakin cepat terwujud.

Secara umum, indeks modal sosial Provinsi Riau berada pada posisi 42,67 pada skala 0-100. Angka ini berada jauh dibawah angka Nasional yang mencapai 47,86. Provinsi Riau menduduki peringkat ke 28 dari 34 provinsi se Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bahwa kondisi modal sosial masyarakat Riau masih harus lebih di tingkatkan lagi agar mampu dijadikan sebagai modal pembangunan.

Jika kita telaah lebih dalam, pada wilayah perdesaan ternyata indeks modal sosial masyarakat Riau lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Indeks modal sosial di perdesaan

sebesar 44,72 serta perkotaan hanya sebesar 39,48.

Selain itu, sikap percaya merupakan unsur utama pembentuk modal sosial. Tanpa adanya rasa percaya, maka akan sangat sulit terjadinya hubungan yang baik disuatu masyarakat, saat ini indeks sikap percaya masyarakat Riau di perdesaan sebesar 59,41 dan di perkotaan sebesar 52,83. Kondisi sikap percaya masyarakat Riau secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 63,69 di perdesaan serta 53,35 di perkotaan. Disamping itu, sikap percaya kita juga berada dibawah Sumatera Barat yang mencapai 62,65 di perdesaan dan 54,61 di perkotaan.

Sikap toleransi beragama masyarakat kita yang menggambarkan sikap mau menerimadan menghargai perbedaan antara anggota masyarakat juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Sikap toleransi beragama di perdesaan hanya sebesar 34,92 dan di perkotaan sebesar 35,96.

Selain itu, dilevel nasional komponen modal sosial yang tidak kalah penting dan patut menjadi perhatian kita adalah semakin mudarnya budaya tolong menolong sesama masyarakat. Kesiediaan masyarakat kita membantu orang lain atau tetangga yang membutuhkan pertolongan hanya sebesar 57,19. Kondisi budaya tolong menolong sesama masyarakat juga tergambar dari mudah tidaknya masyarakat mendapatkan bantuan yang hanya mencapai 50,52.

Semakin mudarnya modal sosial masyarakat kita harus menjadi telaah kita bersama. Kisah nenek Sahnun patutlah menjadi motifasi diri, untuk menjadi masyarakat yang peduli tidaklah kita harus menunggu berdasi. Jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban seperti nenek sahnun, setidaknya sembelihlah sifat sombong pada diri kita yang selalu merasa benar dan selalu ingin didengar.

Selain itu, jika kita belum mampu untuk

melempar jumroh seperti saudara kita yang sedang berhaji, maka setidaknya mari kita lempar sifat iri, dengki, amarah dan dendam pada diri kita, agar kita mampu memandang orang lain atau tetangga kita dengan penuh kasih sayang. Disamping itu, jika kita juga belum mampu untuk mengelilingi ka'bah di musim haji ini, maka setidaknya kunjungilah saudara kita, tetangga kita, sahabat kita agar terjalin silaturahmi yang erat yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan memperkuat modal sosial kita.

Mimpi nenek Sahnun bukanlah ingin memperkaya diri, bukan pula ingin membangun rumah megah bak istana raja. Mimpi nenek sahnun hanyalah ingin mencari nafkah memulung dengan damai, tanpa ada perkelahian di masyarakat, serta masyarakat yang semua peduli kepada sesama. Dan mimpi itu akan terwujud jika modal sosial kita bangun serta tetap kita jaga bersama-sama.

<https://riau.bps.go.id>



## *Migrasi Riau, Peluang atau Masalah?*

Oleh : Mujiono, SE

*Migrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Pola migrasi yang cenderung menuju daerah perkotaan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di perkotaan di wilayah Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Riau. Bahkan, fenomena angka pengangguran di Provinsi Riau besarnya dua kali lipat dibanding angka pengangguran di perdesaan. Pada Agustus 2018, angka pengangguran di perkotaan sebesar 8,87 persen sedangkan di perdesaan hanya 4,41 %. Kenapa Riau menjadi tujuan migrasi?, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momen migrasi ini?*



TERBIT DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, 6 SEPTEMBER 2019

Menurut Penserikatan Bangsa Bangsa (1958) pengertian migrasi adalah bentuk dari mobilitas geografi atau mobilitas ke ruangan dari satu unit geografi ke unit geografi lainnya yang menyangkut perubahan tempat tinggal yang bersifat permanen dari tempat asal ke tempat tujuan. Migrasi juga tidak hanya menyangkut perpindahan internal dalam suatu negara tetapi juga antar negara, antar region, dan bahkan antar benua. Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan transportasi telah menyebabkan kedekatan antar wilayah dan membuka peluang bagi penduduk untuk mengenal berbagai daerah dan membaca peluang daerah tersebut, baik peluang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

**Kenapa Riau menjadi Provinsi Tujuan?**

Lee (1966) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mendasari seseorang memutuskan untuk bermigrasi yaitu faktor di tempat asal, faktor di tempat tujuan, rintangan antara, dan faktor individu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun politik. Faktor-faktor di daerah asal maupun daerah tujuan tersebut bekerja sama untuk menahan atau justru mendorong seseorang untuk melakukan migrasi. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor individu yang sangat menentukan seseorang untuk mengambil keputusan pindah atau tinggal ditempat.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam terutama minyak bumi, gas alam, batu bara

serta potensi yang besar di sektor pertanian/ perkebunan.

Potensi ekonomi Riau yang sangat besar tercermin dalam besaran nilai PDRB Riau. BPS Riau mencatat, Nilai PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 755 triliun rupiah. Yang lebih mencengangkan, Riau merupakan penyumbang ekonomi Indonesia terbesar ke lima setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Besaran nilai PDRB Riau merupakan terbesar diantara semua Provinsi di Pulau Sumatera serta terbesar setelah Pulau Jawa.

Selain sektor migas, potensi pertanian Riau terutama perkebunan kelapa sawit juga merupakan sektor yang sangat potensial di Riau. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luas kelapa sawit terluas di Indonesia. Pada tahun 2018, luas kelapa sawit di Riau mencapai 2,7 juta hektar atau menyumbang 20 persen terhadap total luas kelapa sawit di Indonesia.

Karenanya, luasnya kelapa sawit Riau merupakan sebuah peluang yang sangat besar dan menjanjikan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi para migran untuk migrasi ke Riau. Potensi peluang pekerjaan di sektor perkebunan sangat menjanjikan bagi para migran. Hal ini senada dengan data yang dirilis BPS Provinsi Riau bahwa struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2018 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,79 persen; Perdagangan sebesar 18,61 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 14,72 persen.

### **Seberapa Besar Tingkat Migrasi Riau?**

Letak Provinsi Riau yang sangat strategis dan didukung dengan segala potensi sumber daya alamnya menjadi tujuan utama para migran. Hal ini tercermin dari data migrasi risen pada tahun 2015, penduduk yang

migrasi masuk ke Riau sebesar 215 350 jiwa (Supas 2015, BPS).

Migrasi Risen menangkap perbedaan tempat tinggal sekarang dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu dari seseorang. Migrasi risen lebih menggambarkan fenomena perpindahan terkini, sehingga banyak studi atau penelitian yang menggunakan jenis ukuran migrasi ini. Beberapa Provinsi menunjukkan pola migrasi risen yang sama dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

Angka migrasi risen neto positif terbesar masih dipegang oleh tiga Provinsi yang sama: Kepulauan Riau, Papua Barat, dan D.I Yogyakarta, masing-masing sebesar 70, 51, dan 36 migran per 1.000 penduduk, sedangkan Provinsi Riau sebanyak 15 migran per 1.000 penduduk.

Papua Barat menjadi daya tarik karena wilayahnya yang subur serta merupakan daerah pertambangan, sementara D.I Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar.

Migrasi risen neto negatif yang besar selama 5 tahun terakhir diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Maluku, masing-masing sebesar 22, 10, dan 8 migran per 1.000 penduduk. Ketiga Provinsi ini merupakan daerah pengirim migran. Besarnya migran yang keluar dari DKI Jakarta umumnya menuju Provinsi sekitarnya yaitu Jawa Barat dan Banten. Sementara yang keluar dari Provinsi Sumatera Utara adalah ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta untuk wilayah Maluku pada umumnya banyak keluar ke Papua Barat dan Papua. Banyaknya masyarakat dari Sumatera Utara yang bermigrasi ke Riau merupakan hal yang wajar, mengingat secara geografis letak Provinsi Riau berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Sebenarnya, pengelolaan migrasi yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Migran yang masuk ke Riau jika memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi, mereka akan mampu mengisi kekurangan tenaga kerja pada sek-



tor-sektor tertentu di Riau. Dengan tercupinya suplai tenaga kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan.

Migrasi akan menjadi persoalan serius di Provinsi Riau jika penduduk yang bermigrasi memiliki kemampuan dan keterampilan yang rendah. Dengan rendahnya kemampuan serta keterampilan mereka ditambah dengan pendidikan yang rendah, akan membuat mereka susah bersaing. Migrasi seperti ini akan menambah beban serius pemerintah Provinsi Riau sebagai Provinsi tujuan. Akan timbul permasalahan sosial seperti tingginya angka pengangguran dan lain-lain. BPS mencatat, angka pengangguran di Riau pada Agustus 2017 sebanyak 184,56 ribu orang (6,22 %), menjadi 188,41 orang (5,72 %) pada Februari 2018, bahkan naik kembali menjadi 192,80 ribu orang (6,20 %) pada Agustus 2018. Bahkan, fenomena migrasi ini tercermin dari tingginya angka pengangguran di perkotaan yang nilainya dua kali lipat dari perdesaan. Pada Agustus 2018, angka pengangguran di perkotaan Riau sebesar 8,87 persen sedangkan di perdesaan hanya 4,41 %.

**Akhirnya**, Pemerintah Provinsi Riau serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau harus bersinergi bersama mengelola migrasi dengan baik. Pengelolaan migrasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan investasi yang pada akhirnya akan banyak mencetak lapangan kerja. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup akan mengurangi angka pengangguran, yang pada akhirnya akan mengurangi atau bahkan mengapus kemiskinan di Provinsi Riau.

## Asap Riau Duka Masyarakat Serantau

Oleh : Mujiono, SE

Suatu pagi, disaat anak2 yang lain mungkin masih terlelap dalam tidur dan mungkin sedang menikmati mimpi indah, Syifa dan Dimas telah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun saat membuka pintu, sontak keduanya menyeletuk dan bertanya, "Pa" ini bau apa ya pa? Kok dihidung terasa sengak dan bau?. Begitulah potret derita anak-anak kita saat bencana asap ini terus menggila dan terus mengintai keselamatan mereka.

Syifa dan Dimas hanyalah anak-anak yang mungkin tidaklah faham dengan apa yang terjadi dan mengintai dalam keseharian mereka. Derita yang dirasakan Syifa dan Dimas hanyalah sebuah potret gambaran nasib anak-anak di Riau yang terus menerus dicekoki dengan asap yang sangat mengancam nyawa dan masa depan berharga mereka.

Asap Riau yang menjadi duka masyarakat serantau sangat memberi dampak buruk bagi kesehatan terutama bagi bayi, balita dan anak-anak. Mereka adalah sasaran yang paling beresiko dan sangat rentan terhadap bencana asap ini. Kondisi ini akan menjadi lebih berbahaya jika bayi, balita atau anak-anak ternyata memiliki riwayat penyakit seperti asma ataupun penyakit lain seperti gangguan daya tahan tubuh sehingga sangat membahayakan keselamatan mereka.



TULISAN DIMUAT DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, 9 SEPTEMBER 2019

Penuh sesaknya lorong rumah sakit yang berisi jerit tangis anak-anak akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA merupakan potret awal penderitaan anak-anak di Riau. Satu hal yang pasti, jika fenomena asap ini tidak segera berakhir, maka secara tidak langsung kita telah meracuni anak cucu kita yang tidak lain adalah penerus kita di Negeri tercinta ini dengan racun asap yang sangat mematikan. Karenanya, haruskah penerus kita, anak cucu kita nantinya akan berisi generasi yang sakit-sakitan akibat racun asap kebakaran hutan dan lahan yang tidak lain adalah akibat kelalaian kita semua.

Disamping itu, satu hal yang harus kita sadari, secara nyata kita telah mewariskan kepada generasi penerus kita sebuah kondisi kehancuran dan kerusakan alam. Kesalahan masa lalu kita yang membabi buta dengan melakukan eksploitasi besar-besaran di lahan gambut ternyata turut memperparah bencana asap yang terjadi saat ini.

Eksploitasi lahan-lahan gambut dengan membuat kanal-kanal yang dalam telah membuat lahan-lahan gambut menjadi kering dan rentan terbakar apalagi dimusim kemarau panjang seperti saat ini. Oleh karenanya, upaya nyata untuk merestorasi/

mengembalikan lahan gambut sesuai fungsinya harus segera dilakukan. Restorasi gambut yang dilakukan harus mampu mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut baik dengan upaya pembasahan kembali, penanaman ulang maupun langkah berupa revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut.

Namun, upaya restorasi lahan gambut tidaklah cepat dan mudah. Upaya restorasi lahan gambut membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah memang telah mengeluarkan regulasi tentang moratorium izin di lahan gambut, namun upaya pengawasan maksimal baik pemerintah maupun masyarakat tetaplah harus dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat atau siapa pun yang secara ilegal mengeksploitasi kembali di lahan gambut.

Fenomena asap Riau yang menjadi duka masyarakat serantau ini haruslah menjadi catatan kita semua, bahwa komitmen bersama harus dilakukan agar kebakaran lahan dan hutan tidak lagi terjadi di masa-masa mendatang.

Kita haruslah sadar, sudah Jutaan, Milyaran atau bahkan mungkin Trilyunan Rupiah kerugian telah kita alami akibat asap yang melanda Negeri ini. Sehingga sudah sepatutnya bencana asap ini menjadi pengingat kita semua bahwa bencana ini tidak boleh terulang kembali dimasa-masa yang akan datang.

Tidak cuma itu, kita haruslah bermufakat, janganlah kita mewariskan kepada generasi penerus anak cucu kita sebuah Negeri yang hancur karena kerusakan alamnya. Jangan pula sampai Negeri Riau yang kaya ini meredup dan tiada lagi terbilang karena telah hancur lebur kondisi alamnya.

Memang benar, mengejar

pertumbuhan ekonomi saat ini sangatlah diperlukan, akan tetapi kerusakan alam yang ditimbulkan patutlah tetap kita perhitungkan. Semua upaya itu harus dilakukan agar kita mampu meminimalisir kerusakan alam yang telah atau mungkin akan ditimbulkan di kemudian hari sebagai efek dari mengejar pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan.

Akhirnya, jika kita tidak memulai hari ini untuk menjaga alam kita, lantas kapan lagi?. Haruskah setiap hari kita mengurung, atau bahkan memenjarakan balita dan anak-anak kita agar tidak lagi bermain dengan berlarian di luar sana?. Atau haruskah kisah asap Riau yang menjadi duka masyarakat serantau akan terulang kembali dan menjadi cerita anak-anak kita di pagi hari nantinya? Semua itu bergantung langkah kita bersama hari ini.

Semoga...

## *Rokan Hilir Maju dengan Statistik*

Oleh : Arfina Amalia, SST

*Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bisa dipengaruhi oleh tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Tiga dimensi tersebut dirangkup dalam sebuah indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah yang akan mengukur sejauh mana kualitas SDM di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 sebesar 68,73. Dengan angka tersebut, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir digolongkan berada pada level sedang. Dibandingkan dengan Provinsi Riau yang memiliki IPM sebesar 72,44 kualitas pembangunan manusia Kabupaten Rokan Hilir masih di bawah rata-rata.*



**DIMUAT DI POSMETRO ROKAN HILIR, 30 SEPTEMBER 2019**



Lagu populer berjudul “September Ceria” pernah dinyanyikan oleh Vina Panduwinata di tahun 1980’an. Lagu hasil karya James F Sundakh ini merangkum kondisi seluruh dunia. Di September seluruh dunia merasakan perubahan musim. Negara empat musim di belahan utara memasuki musim gugur, kemudian negara empat musim di belahan selatan memasuki musim semi, dan negara tropis seperti Indonesia biasanya akan masuk musim hujan. Baik penyanyi maupun penciptanya punya cerita tersendiri dengan Bulan September karena sama-sama lahir di bulan ini. Tidak hanya untuk Vina dan Sundakh, makna bulan September juga dirasakan oleh jajaran pegawai di Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia.

Tanggal 26 September kemarin, BPS merayakan peringatan Hari Statistik Nasional

(HSN) 2019. Tema yang diusung adalah “Menuju Indonesia Maju dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Data Berkualitas”. Tema ini relevan dengan fokus pemerintah saat ini yaitu SDM unggul. Tema ini juga berkaitan dengan tugas BPS sebagai lembaga negara yang memiliki visi “Pelopor Data Statistik Untuk Semua”.

Pada apel pagi HSN 26 September di halaman kantor BPS Kabupaten Rokan Hilir, dibacakan sambutan Kepala BPS Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut, dijelaskan tema HSN tahun ini sejalan dengan program prioritas pemerintah yaitu pembangunan SDM dengan menitikberatkan pada kesehatan, pendidikan, vokasi, lembaga, dan manajemen talenta.

Selain itu, peran BPS sebagai penyedia official statistics di Indonesia perlu

dukungan yang kuat dan nyata. Dukungan tersebut datang dari Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui Perpres ini, BPS harus membangun Satu Data Indonesia yang berdasarkan prinsip memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk.

SDM yang berkualitas bisa dipengaruhi oleh tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Tiga dimensi tersebut dirangkup dalam sebuah indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah yang akan mengukur sejauh mana kualitas SDM di suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 sebesar 68,73. Dengan angka tersebut, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir digolongkan berada pada level sedang. Dibandingkan dengan Provinsi Riau yang memiliki IPM sebesar 72,44 kualitas pembangunan manusia Kabupaten Rokan Hilir masih di bawah rata-rata.

Dari dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Rokan Hilir di tahun 2018 sebesar 69,87 tahun, artinya bayi yang lahir ditahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga sekitar 69-70 tahun. Lamanya masa hidup menjadi tolak ukur usia produktivitas yang dihasilkan.

Pada dimensi pendidikan, BPS mencatat masyarakat Rokan Hilir memiliki rata-rata lama sekolah 8,15 tahun artinya rata-rata anak usia sekolah hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP. Sementara itu, angka harapan lama sekolah di Negeri Seribu Kubah ini 12,63 tahun, artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka sampai lulus SMA.

Rendahnya rata-rata lama sekolah

masih harus menjadi prioritas utama bagi berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pilar dasar majunya masyarakat dan negara. Oleh karena itu baik pribadi, keluarga, masyarakat, dan pemerintah saling berkaitan satu sama lain untuk menjadi tim pelaksana kemajuan pendidikan yang bersinergi.

Terakhir, dari dimensi ekonomi diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat di Rokan Hilir sebesar 9,32 juta rupiah per tahun. Artinya, setiap penduduk mengeluarkan 9,32 juta rupiah dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Rokan Hilir masih di bawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 10,97 juta rupiah.

Momentum Hari Statistik Nasional ini diharapkan menjadi penambah semangat dunia perstatistikan demi proses pembangunan Rokan Hilir yang lebih baik. Tidak hanya bagi BPS Rokan Hilir yang semangat dalam mengumpulkan dan menghasilkan data yang berkualitas, tetapi juga bagi Pemda dan masyarakat. Dukungan Pemda dan masyarakat dapat ditunjukkan dengan kesediaannya untuk didata dan kejujurannya memberikan data.

Tahun 2020 mendatang, BPS memiliki pekerjaan besar yaitu menyelenggarakan Sensus Penduduk. Sensus ini dilakukan BPS setiap sepuluh tahun sekali. Semua lapisan masyarakat dan Pemda diharapkan mendukung penuh proyek besar BPS ini termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini semata-mata agar Rokan Hilir memiliki data statistik yang berkualitas untuk pengambilan kebijakan terutama tentang pembangunan SDM unggul yang tepat sasaran dan berdasarkan fakta.



## *Sumpah Di Bawah Asap*

Oleh : Mujiono, SE

*Ada yang berbeda pada hari Jum'at pagi tanggal 6 September 2019. Anak sekolah setingkat SD seperti Syifa dan Dimas pun ikut berkomentar, wuihhh... Banyak betul papan bunganya ya!. Begitulah pagi itu, jajaran papan bunga tersusun dengan rapinya di halaman dan depan Gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman, bahkan sepanjang jalan tersebut juga penuh dengan hiasan papan bunga. Hari itu merupakan sebuah momen yang menandakan sebuah akhir pengabdian yang mulia anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 juga sekaligus merupakan awal pengabdian bagi anggota dewan terpilih masa bhakti 2019-2024.*



**TERBIT DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, 1 OKTOBER 2019**

DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Salah satu diantara tugas dan wewenang DPRD provinsi adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi yang diajukan Gubernur. Disamping itu, tugas yang juga wewenangnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pengawasan penggunaan APBD.

Jum'at 6 September 2019 merupakan

awal sejarah baru bagi yang mulia anggota DPRD Provinsi Riau terpilih yang merupakan wakil-wakil rakyat pilihan kita. Sejarah telah tertulis, dibawah bencana asap yang menggila, wakil-wakil rakyat kita telah disumpah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Berbicara tentang amanah sangatlah menarik untuk diperbincangkan mengingat diantara amanah tersebut adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tentunya bukanlah hanya aspirasi pendukungnya saja, tetapi aspirasi semua lapisan masyarakat Riau yang bisa jadi bukanlah pendukungnya. Nah disinilah yang menarik, mengingat anggota dewan terpilih tentu tidak terlepas dari janji-janji politik kepada pemilihnya. Janji-janji politik yang sudah dijual kepada pemilihnya akan mengharuskan pemenang untuk membayar hutang realisasi janji kepada para pendukungnya. Janji tersebut tentunya juga



harus sejalan dengan amanah diantaranya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Terpilihnya seorang calon anggota DPRD dalam pemilihan umum seyogyanya bukanlah mutlak merupakan perjuangan pribadi calon, melainkan ada partai politik pengusung dengan pemilih-pemilih yang tentunya juga memiliki peran perjuangan dibalik terpilihnya calon anggota dewan tersebut.

Oleh karenanya, setelah menjadi anggota dewan terpilih, pekerjaan mereka tidaklah ringan dan santai, ada beban sangat berat di pundak mereka. Sebagai anggota dewan terpilih yang diusung partai, mereka harus mengikuti aturan partai tempatnya bernaung. Mengikuti aturan partai secara sederhana berarti tunduk dan patuh terhadap keputusan tertinggi partai, padahal mereka juga harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bukan hanya sebatas pemilihnya saja. Lantas apa yang terjadi jika keputusan partai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang notabene telah menjadikannya terpilih sebagai anggota dewan?

Namun, kekhawatiran tersebut kecil kemungkinan akan terjadi mengingat yang mulia anggota-anggota dewan terpilih adalah orang-orang pilihan. Mereka yang duduk disana telah melalui serangkaian proses seleksi dan perjuangan yang begitu berat. Sudah barang tentu mereka-mereka telah lulus dan memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni. Mereka-mereka yang terpilih pastinya akan mampu menjalankan amanah dan janji secara bijaksana demi kemakmuran masyarakat di negeri Riau tercinta ini.

Semoga yang mulia anggota dewan kita akan mampu menjalankan semua tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya. Semoga diawal masa baktinya ini, yang mulia wakil-wakil rakyat kita akan berupaya menghapus sejarah sebuah sumpah dan janji dibawah

asap yang telah tertulis.

Perlu komitmen kita bersama baik pemerintah, legislasi DPRD yang tentunya juga mengawasi kinerja pemerintah daerah serta kita sebagai masyarakat agar tidak ada lagi bencana-bencana kebakaran hutan dan lahan di negeri tercinta kita.

Semoga kelak tidak ada lagi cerita anak cucu kita sebuah sejarah adanya sumpah-sumpah lain di bawah bencana asap, semoga..

## Mengenal Kekuatan Ekonomi Rokan Hilir

Oleh : Arfina Amalia, SST

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir cenderung fluktuatif. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar -0.12 persen, 2018 menjadi tahun yang paling rendah dalam pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah terus menurunnya produksi minyak bumi yang dihasilkan Rokan Hilir. Ada 17 kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi dalam struktur perekonomian suatu daerah. Tiga diantaranya menjadi kategori utama yang dominan menggerakkan perekonomian Rokan Hilir, yaitu kategori Pertambangan dan Pengalihan (46,67 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,73 persen); dan Industri Pengolahan (16,65 persen). Ketiga kategori tersebut memberikan kontribusi hingga 93,05 persen dari keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir. Kategori lapangan usaha sisanya hanya memiliki peran kurang dari 10 persen berkontribusi dalam PDRB Rokan Hilir.



**TERBIT DI KORAN POS METRO ROKAN HILIR, 16 OKTOBER 2019**

Rokan Hilir adalah Kabupaten di Provinsi Riau yang terkenal dengan sebutan “Negeri Seribu Kubah”. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dan merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Bengkalis. Rokan Hilir sendiri memiliki total luas wilayah sebesar 8.881,59 km<sup>2</sup> yang sebagian besar tanahnya bertekstur tanah gambut. Ibukota kabupaten ini terletak di kota kecil bernama Bagansiapiapi, kota yang juga menjadi pusat pemerintahan.

Penduduk Rokan Hilir terdiri dari beragam jenis etnis dan suku, meskipun suku melayu adalah suku asli daerah ini, namun ada juga penduduk asal transmigran seperti jawa, batak, minang, bahkan etnis tionghoa. Beragamnya etnis dan suku di

Rokan Hilir tidak mengendurkan semangat kerukunan antar warganya untuk saling hidup berdampingan. Secara potensi daerah, Rokan Hilir termasuk kabupaten yang memiliki sumber minyak bumi di dalamnya. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga menjadi potensi lainnya yang ada di daerah pemekaran Bengkalis ini.

Pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari beberapa bidang, salah satunya bidang ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam wak-

tu satu tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir cenderung fluktuatif. Di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir mencapai 4,81 persen dan melambat signifikan di tahun 2015 menjadi 0,52 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 1,97 persen dan kembali melambat di tahun 2017 menjadi 1,59 persen. Menjadi hal yang sangat krusial, di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi jatuh menjadi -0.12 persen. Artinya tahun 2018 menjadi tahun yang paling suram dalam pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun terakhirnya Negeri Seribu Kubah ini.

Ada 17 kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi dalam struktur perekonomian suatu daerah. Tiga diantaranya menjadi kategori utama yang dominan menggerakkan perekonomian Rokan Hilir, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian (46,67 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,73 persen); dan Industri Pengolahan (16,65 persen). Ketiga kategori tersebut memberikan kontribusi hingga 93,05 persen dari keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir. Kategori lapangan usaha sisanya hanya memiliki peran kurang dari 10 persen berkontribusi dalam PDRB Rokan Hilir.

Lalu apa yang membuat pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 menjadi sangat jatuh? Salah satu faktor penyebabnya adalah terus menurunnya produksi minyak bumi yang dihasilkan Rokan Hilir. Padahal, hampir setengah dari nilai PDRB Rokan Hilir adalah kontribusi dari kategori Pertambangan dan Penggalian yang mayoritasnya merupakan produksi minyak bumi.

Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan ekonomi Rokan Hilir pada sektor perminyakan. Artinya, pemerintah

daerah belum memaksimalkan sektor potensial lainnya yang turut membangun perekonomian Rokan Hilir. Kedua sektor lainnya yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan dapat dioptimalkan menjadi sektor alternatif agar perekonomian tidak tertumpu pada satu sektor saja.

Jika dibandingkan dengan daerah yang berdekatan dengan Rokan Hilir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2018 melambat -1,62 persen dari tahun 2017. Baik Rokan Hilir maupun Bengkalis menunjukkan karakteristik yang sama yakni ketergantungan ekonomi daerahnya pada sektor perminyakan. Padahal sektor perminyakan di kedua daerah tersebut dilakukan oleh segelintir perusahaan besar saja yang bergerak di bidang perminyakan, dengan demikian besarnya output yang dihasilkan juga tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakatnya.

Lebih dalam lagi, untuk melihat ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat melalui PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah hasil bagi antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tahun 2018, PDRB per kapita penduduk Rokan Hilir tercatat sebesar 112,89 juta rupiah per tahun. Artinya, rata-rata pendapatan satu orang penduduk dalam satu tahun mencapai 112,89 juta rupiah. Jika dalam sebuah keluarga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan dua orang anak), maka diperkirakan pendapatan rumah tangga sebesar 451,56 juta rupiah pertahun. Jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pendapatan. Seseorang dengan pendapatan tersebut seharusnya sudah bisa dikatakan sejahtera.

Ironisnya kondisi bertolak belakang terjadi di lapangan, masih banyak rumah tangga di Rokan Hilir yang mempunyai pendapatan di bawah nilai tersebut. Rumah tangga kurang sejahtera masih sering ditemui di Kabupaten ini. Penyebab ketimpangan ini

adalah hanya sebagian kecil nilai produksi dan pendapatan dari perusahaan perminyakan dan perkebunan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Rokan Hilir.

Pada tanggal 04 Oktober lalu Rokan Hilir merayakan hari jadinya yang ke-20. Di usianya yang sudah menginjak kepala 2, apakah pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir di tahun 2019 ini akan kembali naik atau semakin turun? Setidaknya besar harapan agar Rokan Hilir bisa merayakan hari jadinya tidak hanya dengan kegiatan ceremonial saja tapi dengan capaian pembangunan ekonomi yang lebih baik.

<https://riau.bps.go.id>



## UMK dan Indonesia Maju

Oleh : Mujiono, SE

Tema *SDM Unggul Indonesia Maju dalam HUT RI ke 74* masih menggema hingga kini. Menyongsong Indonesia Maju memang sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, akan tetapi berbicara Indonesia Maju memiliki arti bahwa pondasi ekonomi kita haruslah kuat dan tumbuh disemua lini usaha, salah satunya adalah UMKM. Usaha Mikro Kecil merupakan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Peran yang besar ini terlihat dari dominasi usaha mikro kecil yang tergambar dalam data yang dirilis BPS yang menunjukkan bahwa UMK di Indonesia mencapai 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha di Indonesia, usaha ini tidak termasuk usaha pertanian (BPS, SE Lanjutan). Realitanya dari semua usaha UMK di Indonesia tersebut, sebesar 88,30 persen tidak memperoleh/tidak mengajukan kredit pada bank atau lembaga keuangan. Kondisi ini diperparah bahwa 78 persen UMK di Indonesia mengalami kesulitan/kendala dalam menjalankan usaha, serta 60,14 persen dari total UMK di Indonesia mengalami kesulitan permodalan.



TERBIT DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, 24 OKTOBER 2019



Usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha

kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

### Peran UMK dalam Memperkokoh Fondasi Ekonomi Bangsa

UMK memiliki peran yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. UMK banyak diminati masyarakat karena dapat dilakukan secara sederhana dan mampu menghasilkan nilai ekonomi. Itulah sebabnya kenapa UMK tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain UMK adalah ekonomi kerakyatan yang sebenarnya.



Disamping itu, sejarah membuktikan bahwa UMK mampu bertahan menghadapi krisis. Hal ini terbukti saat krisis ekonomi 1998, UMK tetap berdiri kokoh saat usaha-usaha besar berjatuh. UMK menjadi penopang dan memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia saat itu. Kenapa UMK mampu bertahan?. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa UMK secara umum menghasilkan produk atau jasa yang bersifat konsumsi dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Disamping itu, UMK mampu memaksimalkan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun peralatan, dan yang paling mengagumkan, UMK menggunakan modal sendiri sehingga tidak terbebani bunga bank.

Selain mampu bertahan terhadap krisis, UMK di Indonesia terbukti mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 59,26 juta orang. Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha UMK di Indonesia adalah kategori usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G) yang mencapai 22,49 juta orang.

Tidak cuma itu, secara total, UMK di Indonesia masih mampu menghasilkan omzet/pendapatan lebih dari 5 ribu triliun rupiah, walaupun seperempat usaha usaha menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun UMK di Indonesia mampu bertahan terhadap krisis, mampu menyerap tenaga kerja yang besar, bukan berarti UMK di Indonesia tidak memiliki permasalahan. Dan disinilah peran pemerintah harus tetap ada dalam upaya membina dan mengembangkan UMK di Indonesia.

Pertama, 88,30 persen UMK di Indonesia belum tersentuh oleh bank dan lembaga keuangan. Semua ini tidak terlepas dari minimnya akses mereka terhadap perbankan dan lembaga keuangan ditambah ketiadaan jaminan membuat UMK memilih

menggunakan modal sendiri, dan terkadang mereka terjebak dengan keterikatan terhadap rentenir.

Kedua, UMK di Indonesia umumnya tidak berbadan hukum. BPS mencatat, 93,45 persen UMK di Indonesia tidak berbadan hukum serta 93,78 persen dan 90,24 persen UMK di Indonesia tidak menggunakan komputer dan internet. Ketiadaan badan hukum akan menambah semakin sulitnya UMK mengakses bank dan lembaga keuangan. Minimnya penggunaan teknologi juga membuat UMK di Indonesia sulit untuk mendesain produk serta mempromosikan produknya.

Ketiga, 78 persen UMK di Indonesia mengalami kendala/hambatan, bahkan 60,14 persen mengalami kesulitan permodalan. Kendala-kendala ini mengakibatkan UMK kesulitan dalam mengembangkan usaha.

#### **Akhirnya,**

Mengingat begitu besarnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, sudah selayaknya pemerintah berperan maksimal agar UMK mampu berkembang. Upaya pembinaan memang penting, tapi yang lebih penting adalah pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan yang mampu meningkatkan kinerja UMK.

Regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah harus mampu membuat UMK di Indonesia mudah tersentuh oleh bank dan lembaga keuangan. Walaupun lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 dimana mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, namun ternyata hanya sekitar 12 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit.

Jika UMK minim kendala usaha, serta ditambah permodalan yang cukup maka UMK



akan mudah mengembangkan usahanya. Jika usaha UMK berkembang, maka output atau pendapatan mereka akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka akan semakin banyak UMK di Indonesia yang menjadi usaha besar, dengan begitu akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

Melihat penyerapan tenaga kerja yang begitu besar, maka UMK bisa menjadi salah satu solusi pemerintah Indonesia dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini sangat tepat mengingat Indonesia sedang menghadapi era bonus demografi, dimana usia produktif sangat besar dibanding penduduk usia tidak produktif. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, maka pemerintah tidak akan kesulitan dalam mengelola ledakan penduduk usia produktif tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, besarnya potensi usaha mikro Indonesia yang tercermin dari besarnya omzet/pendapatan juga banyaknya tenaga kerja yang terserap harus mampu kita tingkatkan kapasitas usahanya agar semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya UMK di Indonesia, maka Pondasi ekonomi bangsa ini akan semakin kokoh dan kuat dalam menyongsong Indonesia yang lebih maju ke depan. Semoga..

## *Sejahterakah Nelayan Kita?*

Oleh : Mujiono, SE

*Provinsi Riau merupakan Provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya, tidak terkecuali pada sub sektor perikanan. Wilayah Riau yang banyak dialiri sungai dan laut menjadikan setiap wilayah di Riau memiliki potensi perikanan yang sangat tinggi. Oleh karenanya tidak mengherankan jika masyarakat Riau banyak yang berprofesi sebagai nelayan maupun sebagai pembudidaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama masyarakat yang tinggal di tepian sungai dan masyarakat di pesisir.*

*Walaupun hasil hitungan terakhir BPS, nilai PDRB Riau sub sektor perikanan pada tahun 2018 telah mencapai 21,83 triliun dimana pada tahun 2014 hanya sebesar 17,02 triliun, akan tetapi kondisi nelayan kita masih belum sepenuhnya sejahtera. Permasalahan paling menonjol adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia para nelayan serta minimnya akses mereka pada permodalan. Pertanyaannya, solusi seperti apa agar nelayan kita menjadi lebih sejahtera?*



**TERBIT DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM, 12 DESEMBER 2019**

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan. Profesi mereka bisa sebagai penangkap ikan maupun berprofesi sebagai pembudidaya ikan. Sebagai penangkap ikan, jika ikan sedang melimpah mereka akan mendapatkan pendapatan yang besar. Sebaliknya jika sedang peceklik seperti cuaca dan ombak pasang yang tinggi mereka akan berhenti melaut. Dengan mereka berhenti melaut, maka mereka tidak lagi memiliki pendapatan lain sebagai sumber kehidupan. Begitu juga mereka yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan, mahalnya pakan ikan dan biaya lain terkadang tidak sebanding dengan harga yang mereka peroleh saat panen.

Kondisi diatas, akan membuat nelayan kita akan terjebak pada juragan atau toke, imbasnya mereka akan semakin susah untuk keluar dari kemiskinannya.

Nilai 21,83 triliun yang dihasilkan sub sektor perikanan pada perekonomian Riau pada tahun 2018 sudah selayaknya menjadi cermin bagi Pemerintah Provinsi Riau bahwa kita harus lebih fokus untuk mencari dan menggali potensi-potensi di sektor perikanan. Namun, upaya meningkatkan kinerja sub sektor perikanan harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para Nelayan. Kenapa hal ini begitu penting?. Karena kita tidak akan mampu meningkatkan kinerja sub sektor perikanan jika masyarakat tidak tertarik lagi untuk menekuni usaha -

nelayan karena tidak menguntungkan. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan apakah usaha sub sektor perikanan menarik atau tidak adalah dengan melihat seberapa besar nilai tukar petaninya. Menarik atau tidak memiliki makna apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak untuk dilakukan. Hasil potret BPS, pada November 2019, nilai tukar petani sub sektor perikanan mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dari 112,30 menjadi 112,02. Jika kita telaah lebih dalam, penurunan ini terjadi baik pada nilai tukar petani pada perikanan tangkap maupun pada perikanan budidaya masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,22 dan 0,31 persen.

Melihat fenomena diatas, satu hal yang harus menjadi kesepakatan kita bersama bahwa menurunnya Nilai Tukar Petani pada sub sektor perikanan merupakan Early Warning atau peringatan dini terhadap kondisi usaha perikanan apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak untuk dilakukan. Nilai penurunan memiliki arti bahwa pada periode tersebut nilai uang yang dibayar petani perikanan lebih besar dibandingkan nilai uang yang diterima mereka, artinya pada periode tersebut petani mengalami kerugian.

Selain itu, menurunnya nilai tukar petani perikanan pada perikanan tangkap sering kali disebabkan oleh menurunnya hasil tangkapan mereka di laut sebagai dampak cuaca buruk ataupun faktor lain sehingga tingginya biaya yang dikeluarkan oleh nelayan tidak sebanding dengan nilai yang mereka peroleh atau bahkan mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah melaut. Kondisi diatas jika terus dibiarkan akan membuat nelayan kita berhenti melaut, maka nelayan kita tidak lagi memiliki pendapatan apalagi jika mereka hanya menggantungkan hidup dari melaut.

Kondisi nelayan kita yang sangat rentan tersebut ditambah dengan rendahnya

serta minimnya akses mereka pada permodalan akan semakin memperparah nelayan kita. Fakta dilapangan seringkali nelayan kita harus meminjam uang pada toke/pendana sebagai biaya untuk melaut serta untuk biaya hidup keluarga yang mereka tinggalkan. Kondisi diatas akan membuat nelayan kita tidak bisa lagi menjual hasil tangkapan kecuali hanya kepada toke atau pendana, yang tentunya hal ini sangat merugikan para nelayan kita.

Tidak jauh berbeda dengan nelayan, pada perikanan budi daya, mahalnya biaya pakan ikan dan biaya lain seringkali tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh saat panen. Terkadang para petani ikan budi daya harus menenggak pil pahit kerugian sebagai dampak gagal panen atau pun penurunan harga saat mereka panen. Kondisi tersebut akan semakin membuat buram potensi usaha disektor perikanan budi daya.

Semakin menurunnya nilai tukar petani pada perikanan tangkap yang tentunya menyangkut kesejahteraan para petani ikan kita, harus menjadi catatan serius pemerintah bahwa upaya untuk mensejahterakan petani perikanan adalah mutlak suatu keharusan. Merekalah yang telah berjuang dalam upaya memenuhi kebutuhan protein kita. Jika mereka tidak mau lagi mencari ikan dan membudidaya, lantas siapa lagi yang akan mencukupi kebutuhan ikan untuk kita?.

Oleh karenanya, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui program-program pada sub sektor perikanan selayaknya harus terus dilakukan. Selain itu upaya yang patut dilakukan adalah dengan berupaya maksimal menghidupkan koperasi-koperasi perikanan. Dengan hidupnya koperasi perikanan, maka para nelayan dan pembudidaya akan mudah mendapatkan akses permodalan sehingga memperkecil

potensi mereka terjebak dengan juragan/toke atau pendana.

Disamping itu, jika koperasi-koperasi perikanan telah mampu berperan maksimal, maka koperasi-koperasi tersebut akan mampu menampung semua produksi yang dihasilkan para nelayan dan pembudidaya ikan kita. Dengan tertampungnya semua produksi melalui koperasi, maka para nelayan dan pembudidaya ikan kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga dibanding jika mereka menjual kepada tengkulak atau toke.

Dengan bertambahnya pendapatan mereka, tentunya nelayan dan pembudidaya ikan akan semakin sejahtera. Sejahteranya nelayan dan pembudidaya ikan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terjun menjadi nelayan serta menggeluti usaha-usaha lain di sub sektor perikanan yang pada akhirnya kita akan memiliki kekuatan untuk menggali potensi-potensi perikanan demi semakin makmurnya negeri kita. Semoga.

<https://riau.bps.go.id>





Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131

Telp : (0761) 23042 , Fax : (0761) 21336

Homepage : <http://riau.bps.go.id> E-mail: [bps1400@bps.go.id](mailto:bps1400@bps.go.id)